



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

PELABUHAN PERIKANAN SAMUERA BUNGUS



JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT
TELEPON/FAX: (0751) 751122 EMAIL: pps.bungus@kkp.go.id

KATA PENGANTAR



Widodo, S.Pi, M.Sc
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik keberhasilannya maupun hal-hal lain yang harus dilakukan peninjauan kembali agar dapat mencapai keberhasilan, sekaligus merupakan wujud

transparansi dan akuntabilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai media pertanggung jawaban, laporan ini berisikan tentang Rencana Strategis tahun 2025, Rencana Kinerja tahun 2025, dan Capaian Kinerja 2025. Seluruh hasil realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dituangkan secara transparan dan akuntabel dalam Laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu kami akan terus berupaya menyempurnakan sistem AKIP dan penyajian Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Demikianlah laporan ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Bungus, 23 Februari 2026

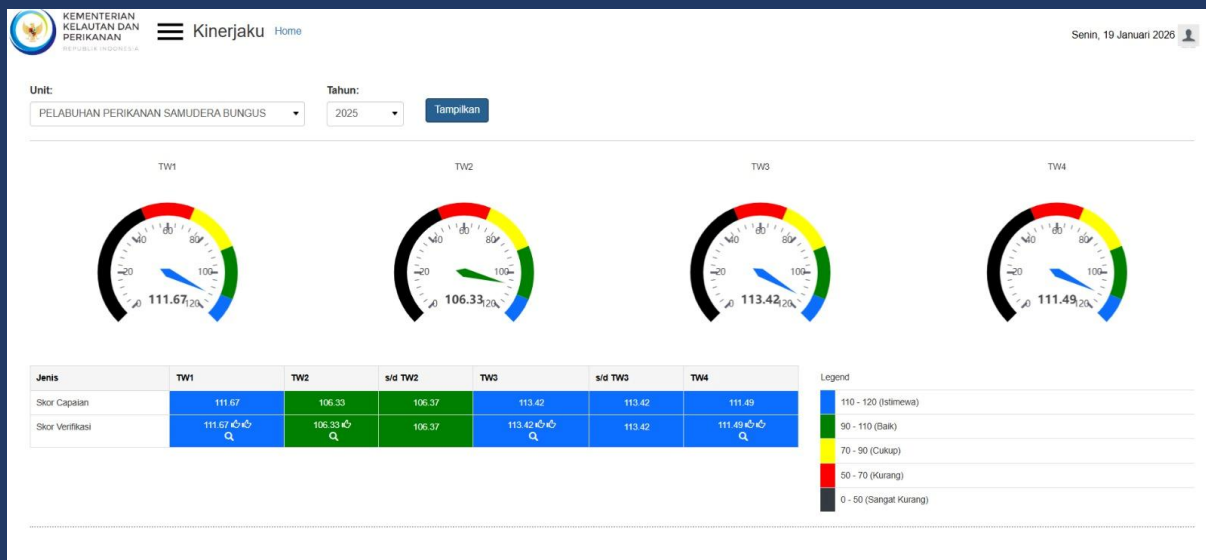
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus



Widodo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 13.481.482.000,- untuk Tahun 2025 dimana yang terealisasi sebesar Rp. 12.573.561.670,- dengan persentase sebesar 93.27% sampai dengan akhir Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus pada tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 111,49%.



Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Bungus Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus Triwulan IV tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target Triwulan IV tahun 2025 yang mencapai angka lebih atau diatas 100% di semua Indikator Kinerja yang ditargetkan (Indikator Kinerja Triwulan IV tahun 2025 Terlampir).

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian Output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan IV tahun 2025 dapat disajikan pada diagram diatas, berdasarkan Dashboard Peta Strategis s/d triwulan IV pada Aplikasi Kinerja: www.kinerjaku.kkp.go.id.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	2
1.2. TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP	7
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	8
2.2.1. <i>Stakeholder Perspective</i>	8
2.2.2. <i>Customer Perspective (Output)</i>	8
2.2.3. <i>Internal Process Perspective (Process)</i>	9
2.2.4. <i>Learning and Growth Perspective (Input)</i>	9
2.3. RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2025	11
2.4. PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA	16
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	70
BAB IVPENUTUP	72
4.1. KESIMPULAN	73
4.2. REKOMENDASI TINDAK LANJUT	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Bungus Tahun 2025	ii
Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2025.....	4
Gambar 3. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025.....	8
Gambar 4. Penerimaan PNBPN 2025	18
Gambar 5. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2025	19
Gambar 6. Perbandingan Realisasi Capaian	20
Gambar 7 Capaian Volume Produksi Tahun 2025.....	23
Gambar 8. Capaian PPS Bungus Tahun 2021 – 2025.....	24
Gambar 9. Perbandingan Capaian.....	24
Gambar 10. Perbandingan dengan Satker Lain.....	28
Gambar 11 Capaian Tingkat Kinerja Tahun 2025	30
Gambar 12. Capaian PPS Bungus tahun 2021-2025.....	31
Gambar 13. Perbandingan Capaian.....	31
Gambar 14. Perbandingan dengan Satker Lain.....	33
Gambar 15. Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2025.....	33
Gambar 16. Perbandingan dengan Satker Lain.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 17. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN tahun 2025.....	39
Gambar 18. Perbandingan Dengan Tahun 2024	39
Gambar 19. Perbandingan dengan Satker Lain.....	39
Gambar 20. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah.....	41
Gambar 21. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya.....	42
Gambar 22. Perbandingan dengan Satker Lain.....	42
Gambar 23. Perbandingan Dengan Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Gambar 24. Perbandingan dengan Satker Lain.....	44
Gambar 25. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2025	47
Gambar 26. Perbandingan Capaian.....	48
Gambar 27. Perbandingan Tahun Sebelumnya	52
Gambar 28. Perbandingan dengan Satker Lain	53
Gambar 29. Capaian PPS Bungus Tahun 2021 - 2025	55
Gambar 30. Perbandingan Capaian.....	55
Gambar 31. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2025	58
Gambar 32. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2025	60
Gambar 33. Perbandingan Capaian.....	61
Gambar 34. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2025	63
Gambar 35. Perbandingan Capaian.....	64
Gambar 36. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	66
Gambar 37. Capaian Nilai SKM PPS Bungus Tahun 2025	68
Gambar 38. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)	73

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025	9
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025	11
Tabel 3. Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC).....	12
Tabel 4. Capaian IKU PPS Bungus hasil Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2025	15
Tabel 5. Target dan Realisasi Nilai PNBPN di PPS Bungus	17
Tabel 6. Capaian Penerima PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	18
Tabel 7. Analisa Efisiensi IKU Penerimaan PNBPN Non SDA di PPS Bungus.....	22
Tabel 8. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2025	23
Tabel 9. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus.....	23
Tabel 10. Analisa Efisiensi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus	26
Tabel 11. Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	27
Tabel 12. Analisa Efisiensi Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	29
Tabel 13. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	31
Tabel 14. Analisa Efisiensi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	32
Tabel 15. Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	33
Tabel 16. Analisa Efisiensi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	35
Tabel 17. Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	36
Tabel 18. Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	39
Tabel 19. Analisa Efisiensi Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	40
Tabel 20. Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	41
Tabel 21. Analisa Efisiensi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.....	43
Tabel 22. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	44
Tabel 23. Analisa Efisiensi Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan.....	45
Tabel 24. Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	46
Tabel 25. Hasil Penilaian LKE WBK PPS Bungus	46
Tabel 26. Analisa Efisiensi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	49
Tabel 27. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2024.....	50
Tabel 28. Analisa Efisiensi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	51
Tabel 29. Capaian Indikator Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	52
Tabel 30. Analisa Efisiensi Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	53

Tabel 31 Analisa Efisiensi Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	56
Tabel 32 Capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus s	57
Tabel 33. Analisa Efisiensi Tingkat Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	59
Tabel 34 Capaian Indikator Presentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	60
Tabel 35. Analisa Analisa Presentase Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	62
Tabel 36. Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	63
Tabel 37. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	64
Tabel 38 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	65
Tabel 39. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	67
Tabel 40. Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera.....	68
Tabel 41. Analisa Efisiensi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera.....	69
Tabel 42. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2025.....	70



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terletak di Jl. Raya Padang-Painan KM. 16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mempunyai visi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Misinya adalah 1) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Memadai dan Ramah Lingkungan, 2) Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah (*Value Added*) dan Daya Saing Produk Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan, 3) Meningkatkan Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan yang Akurat dan Update. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis, yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Rencana Starategis yang telah disusun, selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada Renstra tersebut, dibuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, maka disusunlah dokumen Perencanaan Kinerja (RENJA) yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan setiap tahun anggaran. RENJA tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akunTabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindaklanjut pelaksanaan ditahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Mencakup hal tersebut diatas, pada tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RENSTRA 2020-2025. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja PPS Bungus secara bertahap dari Triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mendukung pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja Triwulan IV tahun 2025 ini akan menginformasikan keberhasilan dalam pencapaian indikator selama Triwulan IV tahun 2025 sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahunan (RKT) 2025 dan Perjanjian Kinerja.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

Fungsi Pemerintahan

- 1) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- 3) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- 5) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- 6) Pelaksanaan kesyahbandaran;
- 7) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- 8) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- 9) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- 10) Pemantauan wilayah pesisir;
- 11) Pengendalian lingkungan;
- 12) Kepabeanan; dan/atau
- 13) Keimigrasian.

Fungsi Perusahaan

- 1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- 2) Pelayanan bongkar muat ikan;
- 3) Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- 4) Pemasaran dan distribusi ikan;
- 5) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 6) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- 7) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 8) Wisata bahari; dan/atau;
- 9) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2025 serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :

Subbagian Umum

Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga,

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas koordinator tersebut adalah mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPS Bungus dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan IV Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan dengan transparan serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan IV tahun 2025 akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2025 yang telah ditargetkan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Dari analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukannya proses identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja yang ada bagi perbaikan kinerja di masa datang. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2025 sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Bab Penutup ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Kepala Pelabuhan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.



BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA

2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku penanggung jawab Program memiliki peran strategis, yakni sebagai: (I) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (II) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (III) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (IV) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (V) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: ***“Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”*** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan.
2. Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
4. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.
5. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Turut serta dalam mewujudkan kedaulatan di laut dengan mengembangkan kegiatan kegiatan yang mempunyai nilai strategis secara sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai guna menjalankan Rencana Strategis yang telah dicanangkan.

Dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. PPS Bungus perlu menerapkan strategi guna mengimplementasikan tujuan pembangunan perikanan tangkap tersebut, dengan menetapkan Sasaran Strategis yang dapat dipergunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu *outcome/impact* dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.



Gambar 3. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan bagian dari Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kerjanya berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Adapun Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang terbagi dalam 4 (tiga) perspektif, yaitu:

2.2.1. Stakeholder Perspective

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam *stakeholder perspective* adalah Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan.

2.2.2. Customer Perspective (Output)

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam *customer perspective* adalah:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

2.2.3. Internal Process Perspective (Process)

Sasaran strategis yang termasuk kedalam *internal process perspective* adalah:

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi.
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
2. Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
 - b. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
3. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja: Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan.

2.2.4. Learning and Growth Perspective (Input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* di PPS Bungus. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat satu sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu adanya Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan.
- b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- c. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- d. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- h. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Informasi cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I Kepada Bawahan (Level II), seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	FREKUENSI	POLA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	2.012,12	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Pelayanan Usaha
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	8.590,89	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Operasional Pelabuhan
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (Persen)	100	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Pelayanan Usaha
		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86	Triwulan	Rata-Rata	Tim Kerja Operasional Pelabuhan
		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	82	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	60	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	30,10	Triwulan	Rata-Rata	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	725	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
		Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	0,26	Semester	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	45,5	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	85	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	88	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	87	Semester	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	76	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	81	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	92	Semester	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	71,5	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera	88,50	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis diatas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengamanatkan satu program utama yang menaungi seluruh kegiatan perikanan tangkap, yakni “Pengelolaan Perikanan Tangkap”. Dari Program utama tersebut telah dijabarkan kembali ke dalam 5 (lima) Kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat penangkapan Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap;

2.3. RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2025

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya, guna pencapaian sasaran yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun Rencana kinerja tahunan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran 2025 (Rp.)
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.021.682.000,-
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	987.524.000,-
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab	
		Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	112.921.000,-
Program Dukungan Manajemen			12.818.746.000,-
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	12.818.746.000,-

2.4. PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2025

Penetapan Kinerja yang telah disusun oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan serta Sasaran Strategis yang telah disusun dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2021-2025.

Sasaran Strategis (SS) dikelompokkan kedalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Bungus pada tahun 2024, untuk semua sasaran strategis berjumlah 7 SS dan 18 IKU. Sasaran strategis ini merupakan suatu panel instrumen yang memetakan sasaran strategis ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi PPS Bungus. Sasaran strategis ini berfungsi untuk memudahkan PPS Bungus untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya dalam rangka menyukseskan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh PPS Bungus sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 yang disusun pada awal tahun 2025 berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) PPS Bungus, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 yang mengacu kepada *Balanced Scorecard* (BSC)

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).	2.012,12
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).	8.590,89
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	100
		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	86
		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	82
		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	60
		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	30,10
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan. (Kapal)	725
		Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan. (Nilai)	026
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Nilai)	45,5
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Persen)	85
		Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Nilai)	88
		Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Indeks)	87
		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Persen)	76
		Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Persen)	81

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Nilai)	92
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Nilai)	71,5
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera. (Indeks)	88,50



BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan beralihnya pengelolaan kinerja KKP, yang telah mengimplementasikan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), PPS Bungus dalam hal ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perikanan Tangkap ikut serta dalam melaksanakan Visi, Misi, dan Tujuan yang ingin dicapai oleh Ditjen Perikanan Tangkap dengan melaksanakan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan oleh DJPT maupun yang ditetapkan sendiri oleh PPS Bungus.

Tabel 4. Capaian IKU PPS Bungus hasil *Balanced Scorecard* (BSC) Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				% CAPAIAN TW IV		
		Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV			
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).	2.012,12	400	900	1.450	2.012,12	390,97	818,74	1.547,29	2.014,01	100,09%
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).	8.590,89	2050	4.150	6.320	8.590,89	2.424,1	4.944,1	7.281,65	9.602,89	111,78%
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab.	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	100	-	-	-	100	-	-	-	100	100%
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	84	86	86	86	84	91,08	90,42	90,83	89,83	104,45%
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	81	-	-	-	81	-	-	-	107,66	131,29%
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	57	-	-	-	57	-	-	-	100	166,67%
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	94,54	94,44	91,49	93,16	309,50%
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal).	412	695	705	715	412	797	890	140,7	1.102	152%
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan. (Nilai)	30,15	-	0,26	-	30,15	-	0,5	-	0,38	146,15%
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Nilai)	75	-	-	-	75	-	-	-	87,29	191,85%
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Persen)	80	80	85	100	80	100	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				% CAPAIAN TW IV	
		Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
	12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Nilai)	94	-	-	-	94	-	-	-	90,00	102,27%
	13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	84	-	82	-	84	-	88,38	-	89,38	102,74%
	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Persen)	80	76	76	76	80	100	0,00	100	100	131,58%
	15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Persen)	80	-	-	-	80	-	-	-	100	123,46%
	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. (Nilai)	93,76	-	85	-	93,76	-	98,04	-	96,39	104,77%
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71	-	-	-	71	-	-	-	95,00	132,87%
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,30	88,50	88,50	88,50	88,30	97,99	98,62	91,87	92,11	104,08%

Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja triwulan berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
5. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah melaksanakan berbagai kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kinerja (SK) 1: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Indikator Nilai PNBP PPS Bungus adalah seluruh penerimaan PPS Bungus yang merupakan pelaksanaan dari fungsi pengusahaan PPS Bungus sebagai unit Pelaksanan Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP PPS Bungus didasarkan pada PP Nomor 75 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Ada dua jenis penerimaan di PPS Bungus, yakni penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan fungsional di PPS Bungus, yaitu: Pelayanan Penggunaan tanah dan bangunan, tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan perikanan, pelayanan penggunaan peralatan dan mesin, pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan, pelayanan penggunaan peralatan pengolahan, pelayanan penggunaan transportasi, pelayanan tambat untuk kapal perikanan, pelayanan tambat untuk kepala non perikanan, pelayanan docking dengan perkerjaan, pelayanan perbaikan kapal, pelayanan pengadaan air, pelayanan bengkel pelayanan pas masuk harian, pelayanan pas masuk berlangganan, pelayanan kebersihan di kawasan pelabuhan, pelayanan kebersihan kolam pelabuhan, dan pendapat jasa lainnya.

Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus

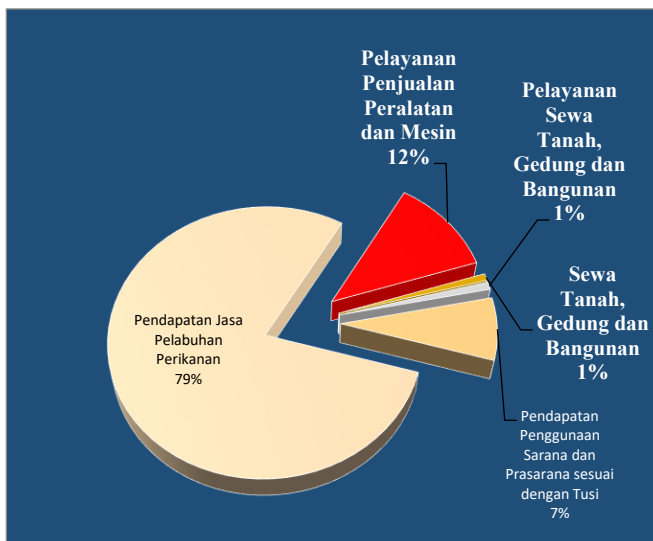
Target dan Realisasi

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan.

Tabel 5. Target dan Realisasi Nilai PNBP di PPS Bungus

Akun	Jenis Jasa	Target 2025 (Rp.)	Realisasi Triwulan IV (Rp.)
425122	Pelayanan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	237.791.200
425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	16.761.000
425151	Pelayanan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	29.568.000	18.138.521
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	335.550.000	150.592.524
	Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan	214.300.000	47.646.515
	Tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan Perikanan	32.500.000	7.291.900
	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	55.000.000	83.839.109
	Pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan	22.500.000	8.940.000
	Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengolahan	9.000.000	-
	Pelayanan Penggunaan Transportasi	2.250.000	2.875.000
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.647.000.000	1.590.724.535
	Pelayanan tambat untuk Kapal Perikanan	100.000.000	388.628.685

Akun	Jenis Jasa	Target 2025 (Rp.)	Realisasi Triwulan IV (Rp.)
	Pelayanan Tambat untuk Kapal Non Perikanan	1.000.000.000	123.727.500
	Pelayanan Docking dengan Pekerja	140.000.000	136.520.000
	Pelayanan Perbaikan Kapal	66.000.000	159.654.000
	Pelayanan Pengadaan Air	34.000.000	69.500.000
	Pelayanan Bengkel	2.400.000	2.000.000
	Pelayanan Pas Masuk Harian	95.000.000	29.301.000
	Pelayanan Pas Masuk Berlangganan	75.000.000	37.740.000
	Pelayanan Kebersihan di Kawasan Pelabuhan	11.600.000	17.412.364
	Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan	88.000.000	36.169.350
	Pendapatan Jasa Lainnya	35.000.000	590.071.636
TOTAL PENERIMAAN		2.012.118.000	2.014.007.780

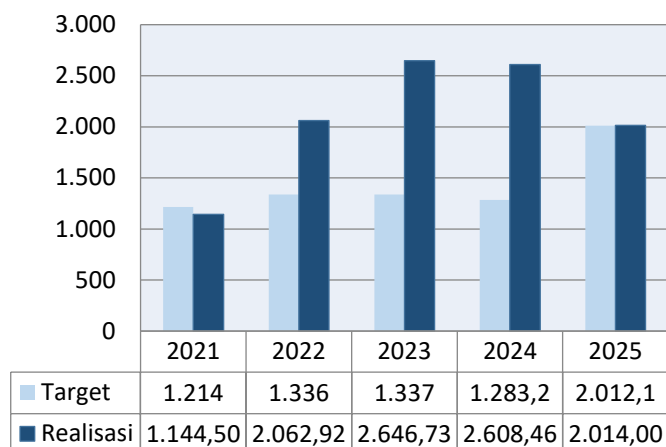


Realisasi PNBPNP paling besar pada tahun 2025 berasal dari akun pendapatan jasa lainnya dengan penerimaan sebesar Rp. 590.071.636,- (29,30%) dari total penerimaan tahun 2025. Sedangkan realisasi dari akun pendapatan penggunaan sarana dan prasarana, penerimaan terbanyak berasal dari Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 83.839.109,- atau sebesar 4,16% dari total penerimaan tahun 2025.

Gambar 4. Penerimaan PNBPNP 2025

Tabel 6. Capaian Penerima PNBPNP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 1		Nilai PNBPNP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 1		Penerimaan PNBPNP Non SDA di PPS Bungus							
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
1.144,50	2.062,92	2.646,73	2.608,46	2.014,00	2.012,11	2.014,00	100,09	1.000	2.014,00



Gambar 5. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 5. Capaian PPS Bungus Tahun 2021–2025, terlihat dinamika capaian PNBPN yang cukup kontras antara periode awal dan tiga tahun terakhir.

Pada 2021, target ditetapkan sebesar 1.214 juta, sementara realisasi hanya mencapai 1.144,50 juta. Artinya, terjadi selisih negatif dan target tidak tercapai. Ini menunjukkan bahwa pada fase tersebut kinerja penerimaan masih menghadapi kendala, baik dari sisi faktor eksternal yang memengaruhi

operasional, volume aktivitas pelabuhan, maupun produktivitas.

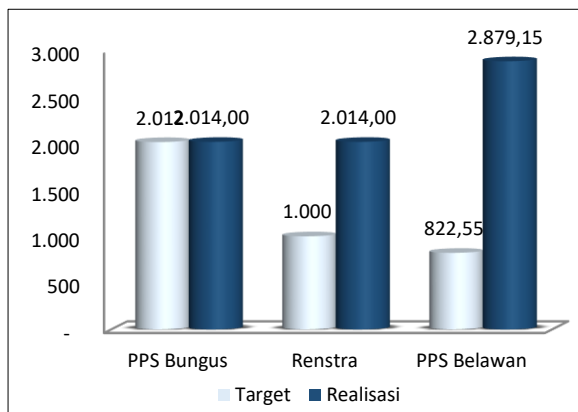
Memasuki 2022, terjadi lonjakan signifikan. Dengan target sebesar 1.336 juta, realisasi melonjak menjadi 2.062,92 juta. Kenaikan ini bukan hanya melampaui target, tetapi juga meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan adanya perbaikan kinerja yang substansial—baik dari optimalisasi layanan, peningkatan pemanfaatan fasilitas, maupun strategi penagihan dan pengelolaan PNBPN yang lebih efektif.

Tren positif tersebut berlanjut pada 2023, di mana target sebesar 1.337 juta kembali terlampaui jauh dengan realisasi mencapai 2.646,73 juta. Ini menjadi capaian tertinggi dalam periode lima tahun. Realisasi hampir dua kali lipat dari target menunjukkan bahwa target yang ditetapkan relatif konservatif dibandingkan dengan potensi riil penerimaan.

Pada 2024, meskipun target sedikit diturunkan menjadi 1.283,2 juta, realisasi tetap tinggi di angka 2.608,46 juta. Konsistensi capaian di atas 2,6 miliar menunjukkan bahwa peningkatan sejak 2022 bukan fenomena sesaat, melainkan tren kinerja yang stabil dan terjaga.

Tahun 2025 memperlihatkan penyesuaian target yang signifikan menjadi 2.012,1 juta, lebih tinggi dibanding tiga tahun sebelumnya. Realisasi tercatat sebesar 2.014,00 juta, sehingga target tetap terlampaui meskipun dengan selisih yang sangat tipis. Ini menunjukkan dua hal: pertama, target sudah lebih realistis dan mendekati potensi aktual; kedua, ruang pertumbuhan yang sangat besar seperti periode 2022–2024 mulai menyempit.

Secara keseluruhan, setelah ketidaktercapaian target pada 2021, PPS Bungus berhasil melakukan akselerasi kinerja mulai 2022 hingga 2024 dengan realisasi yang jauh melampaui target. Tahun 2025 menandai fase normalisasi, di mana target sudah disesuaikan lebih tinggi dan capaian mulai berada pada level yang lebih seimbang antara perencanaan dan realisasi. Tren lima tahun ini mencerminkan pengelolaan PNBPN yang semakin matang dan berbasis pada potensi riil pelabuhan.



Gambar 6. Perbandingan Realisasi Capaian

Berdasarkan grafik perbandingan, capaian PNBPN tahun 2025 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi penerimaan PNBPN tercatat sebesar ±2.014,00, sedikit melampaui target yang telah ditetapkan sebesar ±2.012,01. Jika dihitung dalam persentase, capaian ini berada di atas 100% dari target, yang menunjukkan bahwa PPS Bungus mampu memenuhi bahkan melampaui target penerimaan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) sebesar 1.000, capaian ini menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Realisasi sebesar ±2.014,00 berarti sekitar 201% dari target Renstra. Hal ini mencerminkan bahwa PPS Bungus tidak hanya berhasil memenuhi target tahunan, tetapi juga melampaui perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan adanya pengelolaan yang efektif, optimalisasi layanan, serta strategi operasional yang berjalan dengan baik.

Apabila dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan sebagai satuan kerja setara, PPS Bungus tetap menunjukkan kinerja yang solid. Meskipun PPS Belawan mencatat realisasi yang lebih tinggi secara nominal, yaitu ±2.879,15 dari target ±822,55, PPS Bungus mampu menjaga konsistensi pencapaian terhadap target besar yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan target tahunan yang relatif tinggi, keberhasilan PPS Bungus dalam mencapai dan melampaui target tersebut menunjukkan perencanaan yang matang dan kapasitas penerimaan yang stabil.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menggambarkan bahwa PPS Bungus memiliki kinerja yang sangat baik pada tahun 2025, baik dibandingkan dengan target tahunan, target Renstra, maupun dalam konteks perbandingan dengan satuan kerja sejenis. Pencapaian ini mengindikasikan pengelolaan pelabuhan yang efektif serta potensi berkelanjutan dalam meningkatkan penerimaan PNBPN di masa mendatang.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian PNBPN Non-SDA tahun 2025 di PPS Bungus tidak terlepas dari konsistensi dan kedisiplinan petugas layanan dalam memberikan pelayanan serta melakukan penagihan kepada para pengguna jasa. Optimalisasi berbagai layanan, seperti tambat kapal nonperikanan, tambat kapal perikanan, penggunaan peralatan dan mesin, penyediaan air bersih, hingga jasa perbaikan kapal, turut berkontribusi signifikan dalam mendukung peningkatan penerimaan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Meski demikian, realisasi PNBPN tahun 2025 di PPS Bungus masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan dalam perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Kondisi ini berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan serta efektivitas pengelolaan fasilitas pelabuhan. Minimnya kepatuhan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dibutuhkan

langkah konkret melalui penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan regulasi yang lebih tegas, serta sistem pengawasan yang lebih disiplin agar target penerimaan PNBPN dapat dicapai secara maksimal dan berkelanjutan.

Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi kegiatan Pendampingan dan Supervisi Operasional. Pendampingan dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan langsung kepada pelaku usaha maupun pegawai, guna memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan, standar, serta prosedur kerja yang berlaku. Melalui proses ini, kapasitas teknis dan manajerial meningkat, sehingga potensi kesalahan, ketidaksesuaian, maupun pelanggaran dapat ditekan sejak awal.

Di sisi lain, Supervisi Operasional berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan ini mencakup pemantauan rutin, pemeriksaan berkala, serta evaluasi kinerja secara sistematis. Dengan pengawasan yang terstruktur, setiap potensi penyimpangan dapat diidentifikasi secara dini dan segera ditindaklanjuti, sehingga pencapaian target IKU lebih terukur dan terkendali.

Sinergi antara pendampingan dan supervisi menciptakan sistem kerja yang lebih disiplin, transparan, dan akuntabel. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pencapaian IKU, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap konsistensi organisasi dalam menjalankan mandatnya.

Selain berdampak pada hasil jangka pendek, kedua program tersebut juga membentuk budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada mutu. Transfer pengetahuan yang berkelanjutan mempercepat penyesuaian terhadap perubahan regulasi maupun perkembangan teknologi, sementara pengawasan yang konsisten menumbuhkan rasa tanggung jawab individu dan kolektif. Dengan demikian, organisasi tidak hanya memperbaiki kinerja internal, tetapi juga memperkuat posisi dan reputasinya melalui penerapan standar operasional yang unggul dan berkelanjutan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumberdaya pendukung meliputi 2 (dua) hal, yaitu anggaran dan sumber daya manusia.

Anggaran

Tabel 7. Analisa Efisiensi IKU Penerimaan PNBPN Non SDA di PPS Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Penerimaan PNBPN Non SDA di PPS Bungus	100,09%	119,210,000	118,898,250	242.353.930	123.455.680
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				104%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{104\%}{20} \times 50 \right)$				310%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Penerimaan PNBPN Non SDA sebesar Rp. 118,898,250,- atau sekitar 99,74% dari total anggaran Rp. 119,210,000,- dengan tingkat efisiensi RO sebesar 104% dan nilai efisiensi 310%.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Penerimaan PNBPN Non SDA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, didukung oleh Tim Petugas Pelayanan Publik, yang terdiri dari 11 orang pegawai petugas Pelayanan Jasa PNBPN. Terdapat pegawai yang memegang lebih dari satu jenis pelayanan Jasa. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA) yang telah terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

Sasaran Kinerja (SK) 2: Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat

Sasaran kinerja kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah “Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPS Bungus. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Pendataan di Pelabuhan Perikanan. Pendataan dilaksanakan oleh petugas pendataan terhadap produksi ikan yang didaratkan dengan menggunakan form monitoring data produksi harian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi, selanjutnya diolah oleh petugas pengelola data, serta dilaporkan secara berkala, baik harian, bulanan, dan triwulanan sebagai bentuk realisasi produksi perikanan tangkap.

Target dan Realisasi

Tabel 8. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2025

No	Bulan	Volume Jumlah Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
1	Januari	778,625	5.910.211.000
2	Februari	830,006	8.989.895.000
3	Maret	815,464	9.229.971.000
4	April	763,427	8.528.053.000
5	Mei	917,268	9.706.563.000
6	Juni	839,345	9.931.039.000
7	Juli	799,147	9.456.800.000
8	Agustus	722,921	8.020.011.000
9	September	815,432	9.385.763.000
10	Oktober	779,026	9.652.580.000
11	November	787,496	9.847.155.000
12	Desember	754,707	9.758.005.000
Total		9.602.864	108.416.046.000



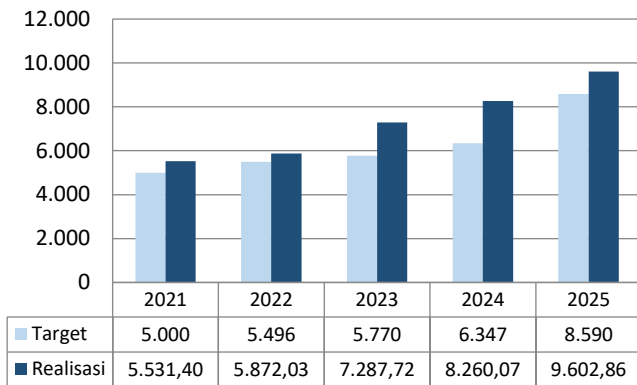
Gambar 7 Capaian Volume Produksi Tahun 2025

Berdasarkan grafik ini dapat terlihat bahwa produksi tahun 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang tahun. Produksi relatif stabil dari Januari hingga Juli, kemudian mengalami penurunan pada bulan Agustus dengan volume 722,921 ton. Produksi tertinggi pada bulan Mei dan mencapai puncaknya pada periode tersebut sebesar 917,27 ton, yang mencerminkan adanya peningkatan produksi. Secara

keseluruhan, total produksi sepanjang tahun mencapai 9.602,86 ton dengan rata-rata produksi bulanan sebesar 800,24 ton. Pola ini mengindikasikan adanya pengaruh faktor musiman maupun operasional terhadap produksi, di mana pemulihan pada pertengahan tahun menunjukkan perbaikan yang efektif, sementara kestabilan di akhir tahun menjadi peluang untuk menjaga dan mengoptimalkan kinerja produksi ke depan..

Tabel 9. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus

SK 2		Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat							
IK 2		Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
5.531,4	5.872,03	7.287,72	8.260,07	9.602,86	8.590,89	9.602,86	111,78	1.000	9.602,86

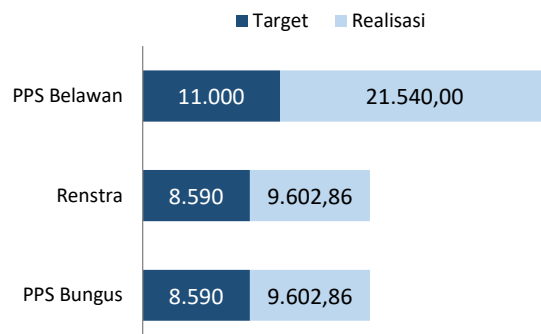


Gambar 8. Capaian PPS Bungus Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan Gambar 8. Capaian PPS Bungus Tahun 2021–2025, terlihat adanya tren peningkatan baik pada target maupun realisasi volume produksi setiap tahunnya. Realisasi produksi menunjukkan kenaikan yang konsisten, dari sebesar 5.531,40 ton pada tahun 2021 menjadi 9.602,86 ton pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan kinerja produksi yang terus membaik seiring waktu.

Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2024, realisasi volume produksi di PPS Bungus tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar $\pm 3,84\%$. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional dan efektivitas pengelolaan produksi perikanan. Selain itu, target volume produksi tahun 2025 ditetapkan sebesar 8.590 ton, meningkat sekitar $\pm 10\%$ dibandingkan target tahun sebelumnya. Kenaikan target ini mencerminkan optimisme dan keyakinan terhadap kemampuan PPS Bungus dalam meningkatkan kapasitas produksinya.

Sementara itu, Gambar 9. Perbandingan Capaian menunjukkan perbedaan capaian produksi antara PPS Bungus dan PPS Belawan. Realisasi produksi PPS Bungus tercatat sebesar 9.602,86 ton, melampaui target 8.590 ton atau sekitar 14,4%. Di sisi lain, PPS Belawan mencatat realisasi produksi yang jauh lebih tinggi secara absolut, yaitu 21.540,00 ton, melampaui target 11.000 ton dengan peningkatan sekitar 30%.



Gambar 9. Perbandingan Capaian

Perbandingan ini menunjukkan bahwa PPS Belawan memiliki kapasitas produksi yang lebih besar dari sisi volume total, sedangkan PPS Bungus menunjukkan efisiensi dan kinerja yang baik dalam melampaui target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kedua pelabuhan menunjukkan kinerja produksi yang positif, dengan kontribusi produksi PPS Belawan lebih besar secara kuantitas, sementara PPS Bungus unggul dalam konsistensi peningkatan dan pencapaian target.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi volume produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus tidak terlepas dari sinergi yang efektif antara Kelompok Kerja Kesyahbandaran dan Kelompok Kerja Operasional. Kolaborasi ini menciptakan alur kerja yang efisien dan terintegrasi, memungkinkan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing pihak secara optimal. Peran ini didukung oleh koordinasi yang solid, sehingga setiap hambatan operasional dapat segera diatasi.

Di samping itu, kontribusi petugas pendataan ikan juga memegang peranan penting. Dengan pemantauan lapangan dan dermaga secara konsisten, mereka tidak hanya memastikan kelancaran aktivitas bongkar muat, tetapi juga mencatat data hasil tangkapan dan nilai produksi dengan cermat. Ketelitian ini menjadi elemen kunci dalam mendukung validitas data dan perencanaan strategis untuk mencapai target volume produksi.

Peningkatan aktivitas kapal penangkapan ikan di wilayah PPS Bungus turut memperkuat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) volume produksi. Aktivitas yang intensif ini memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian volume produksi yang bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan realisasi volume produksi di PPS Bungus pada tahun 2025, beberapa tantangan eksternal perlu diantisipasi. Salah satu hambatan utama adalah kondisi cuaca yang tidak menentu, yang sering kali mengganggu operasional kapal penangkap ikan. Selain itu, fase terang bulan juga memengaruhi perilaku ikan, sehingga mengurangi efektivitas penangkapan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi adaptasi yang terencana dan fleksibel. Misalnya, penyusunan jadwal operasional yang mempertimbangkan prediksi cuaca dan fase bulan, serta penggunaan teknologi penangkapan yang lebih efisien. Dengan pendekatan yang tepat, dampak dari faktor eksternal dapat diminimalkan, sehingga target produksi tetap tercapai secara optimal tanpa mengorbankan aspek keberlanjutan sumber daya perikanan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator volume produksi pada tahun 2025 adalah :

- a) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
- b) Pelaksanaan Pendataan Produksi Perikanan Untuk menunjang PNBP Pasca Produksi;
- c) Peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan perikanan;
- d) Koordinasi antar-stakeholder dalam pengelolaan perikanan tangkap;
- e) Sosialisasi dan penerapan kebijakan keberlanjutan sumber daya perikanan;
- f) Penguatan program pemberdayaan nelayan dan kelompok usaha perikanan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumberdaya pendukung meliputi 2 (dua) hal, yaitu sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia.

Anggaran

Tabel 10. Analisa Efisiensi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus	111,78%	14.279.000	14.212.700	15.961.066	1.748.366
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				12,24%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{56,22\%}{20} \times 50\right)$				190,55%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.279.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir 2025 mencapai Rp 14.212.700 atau 99,54% dengan efisiensi 12,24% dan nilai efisiensi 190,55%.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari petugas pendataan produksi, pengelola data perikanan, dan verifikator data produksi. Seluruh SDM ini tergabung dalam tim kerja operasional pelabuhan, sehingga memungkinkan koordinasi yang lebih efektif serta sinkronisasi data produksi yang lebih akurat. Dengan adanya sinergi antarpetugas, proses pencatatan, pengelolaan, dan verifikasi data dapat berjalan dengan lancar, mendukung penyajian informasi produksi yang valid dan terpercaya. Hal ini berkontribusi pada peningkatan akurasi pelaporan serta pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan perikanan tangkap di PPS Bungus.

Sasaran Kinerja (SK) 3: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Sasaran kinerja keenam (SK-3) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan.

Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNPB yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan perusahaan.

Target dan Realisasi

Indikator Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi merupakan perhitungan dari usulan perusahaan baik baru ataupun perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan perusahaan yang masuk di PPS Bungus. Realisasi indikator ini disajikan dalam tabel berikut.

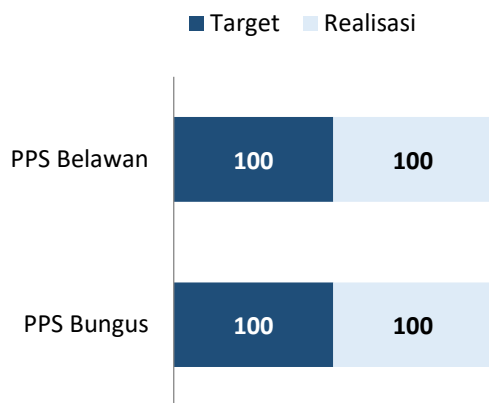
Tabel 11 Capaian Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab							
IK 3		Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)							
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	100	100	100	100	100	100	-	-

Realisasi capaian indikator persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, terdapat sebanyak 29 permohonan perusahaan, baik berupa permohonan baru maupun perpanjangan izin, yang diajukan di PPS Bungus.

Capaian 100% ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan yang masuk telah diproses secara menyeluruh, mulai dari tahap verifikasi berkas administrasi, analisis kelayakan teknis dan ekonomi, hingga evaluasi akhir sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen PPS Bungus dalam memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan transparan kepada para pelaku usaha perikanan, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan ini juga menjadi bukti dari efektivitas koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti tim evaluasi teknis, petugas administrasi, dan pemangku kebijakan di PPS Bungus. Proses yang terstruktur dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan permohonan, seperti sistem elektronik untuk memantau status permohonan, turut berkontribusi terhadap pencapaian ini.



Gambar 9. Perbandingan dengan Satker Lain

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian tahun 2025 di PPS Bungus tetap konsisten, yaitu mencapai 100%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa PPS Bungus mampu mempertahankan kinerja optimal dalam memproses, menganalisis, dan mengevaluasi seluruh permohonan perusahaan, baik yang baru maupun perpanjangan.

Apabila dibandingkan dengan unit kerja lainnya, capaian realisasi PPS Bungus pada tahun 2025 setara dengan PPS Belawan, yang juga berhasil mencapai tingkat realisasi

100%. Artinya, seluruh permohonan perusahaan yang diajukan di PPS Belawan pada tahun 2025 telah dianalisis dan/atau dievaluasi secara menyeluruh. Kesamaan ini mencerminkan komitmen bersama antarunit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha perikanan di wilayah masing-masing.

Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target, tetapi juga mengindikasikan standar operasional yang merata dan penerapan prosedur evaluasi yang efektif di seluruh unit kerja.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di PPS Bungus didukung oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah tingginya peluang investasi di kawasan PPS Bungus, yang didukung dengan ketersediaan lahan strategis untuk pengolahan dan pengembangan usaha. Kondisi ini memberikan potensi signifikan untuk menarik minat para pelaku usaha dalam mengajukan permohonan perusahaan. Selain itu, keberhasilan ini juga diperkuat dengan keseriusan tim pelayanan usaha dalam mengoptimalkan sistem pelayanan dan pengelolaan. Namun, terdapat hambatan yang perlu diperhatikan, yaitu masih adanya lahan dan bangunan di kawasan pelabuhan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tantangan ini berpotensi memengaruhi capaian indikator kinerja di masa mendatang jika tidak segera ditangani. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pelayanan usaha secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, baik melalui media informasi maupun kegiatan langsung seperti survei indeks kepuasan konsumen. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan animo stakeholder, menyampaikan informasi terkini, serta menerima masukan berupa saran atau keluhan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja juga tidak lepas dari pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang mencakup aspek tata kelola yang baik serta operasional perusahaan yang efektif. Tata kelola yang baik diwujudkan melalui penerapan prosedur yang jelas, terstruktur, dan efisien untuk memastikan setiap permohonan perusahaan dianalisis dan dievaluasi secara tepat waktu dan akurat. Dalam pelaksanaannya, PPS Bungus mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang detail, memberikan pelatihan berkala kepada staf untuk

meningkatkan kompetensi mereka, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pengelolaan. Penggunaan sistem informasi berbasis digital memungkinkan pelacakan status permohonan secara real-time, mengurangi risiko kesalahan administratif, serta meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan data.

Di sisi lain, operasional perusahaan yang efektif memastikan kelancaran seluruh proses di pelabuhan. Hal ini dilakukan melalui pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan evaluasi, koordinasi yang harmonis antarunit kerja, dan evaluasi berkala terhadap kinerja operasional. Penilaian rutin ini penting untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang muncul, sehingga langkah korektif dapat segera diambil. Dengan pendekatan ini, PPS Bungus berhasil menciptakan sinergi antara tata kelola dan operasional, yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan permohonan perusahaan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 12 Analisa Efisiensi Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi	100%	85.699.000	85.550.143	85.699.000	148.857
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				0,17%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{19,81\%}{20} \times 50\right)$				50,43%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 85.699.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir 2025 mencapai Rp 85.550.143 atau 99,83% dengan efisiensi 0,17% dan nilai efisiensi 50,43%.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator ini didukung dengan komitmen dan sinergi tim pelayanan usaha yang di support satu orang ketua tim kerja dengan tiga orang pegawai terdiri dari: satu orang penelaah pengembangan usaha, satu orang AP3T dan satu orang P3T yang bertanggungjawab terhadap urusan perusahaan di pelabuhan.

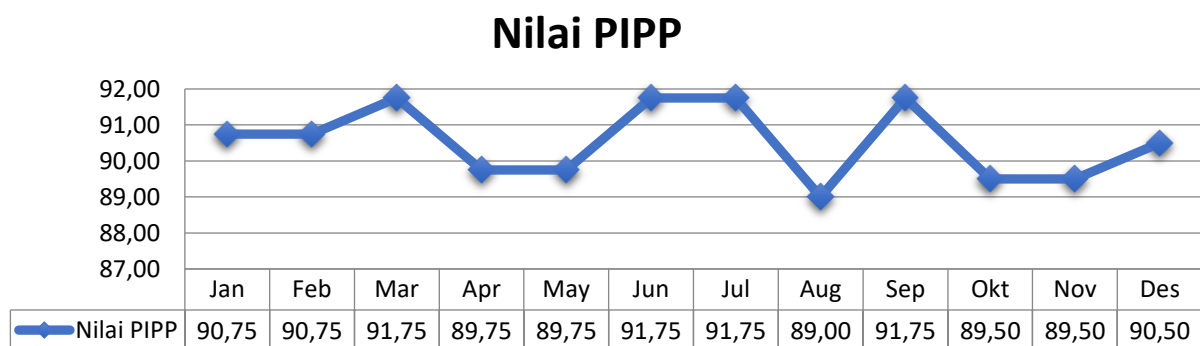
Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan penilaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan sesuai keputusan Dirjen No 20/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

IKU ini juga merupakan nilai atas capaian tingkat operasional laporan yang mendukung kegiatan-kegiatan operasional UPT PPS Bungus berupa pengumpulan data, informasi, publikasi, dan kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang di nilai setiap bulan dari eselon I DJPT (EVKIN) yang meliputi 27 jenis kriteria yaitu: Frekuensi Pengiriman Data (PIPP), ELogbook, Aplikasi SPB-online, SHTI, Realisasi Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pelabuhan, Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan, Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan, Panjang Dermaga, Kedalaman Kolam, Sarana Perbaikan (Docking, bengkel), Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan, Ketersediaan Lahan Pelabuhan, Pelayanan Tambat Labuh, Produksi Perikanan, Frekuensi Kunjungan Kapal, STBLKK, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis, Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi, Pelaksanaan K5, Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan), Penyaluran Es (kapal), Penyaluran BBM (kapal), Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP, Pemanfaatan Lahan Pelabuhan, Penyerapan Tenaga Kerja, Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan.

Target dan Realisasi



Gambar 10 Capaian Tingkat Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan data capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Tahun 2025 pada grafik “Nilai PIPP”, analisis per triwulan menunjukkan pola fluktuasi yang tetap berada dalam rentang kinerja tinggi (89–92).

Pada triwulan pertama (Januari–Maret), capaian kinerja relatif stabil dan menunjukkan tren peningkatan. Nilai Januari dan Februari sama, yaitu 90,75, kemudian meningkat menjadi 91,75 pada Maret. Hal ini menunjukkan awal tahun yang cukup kuat dengan perbaikan kinerja yang konsisten.

Memasuki triwulan kedua (April–Juni), terjadi penurunan pada April dan Mei menjadi 89,75. Namun, pada Juni capaian kembali meningkat signifikan menjadi 91,75. Pola ini mengindikasikan adanya tantangan operasional pada awal triwulan, tetapi mampu dipulihkan dengan cepat pada akhir periode.

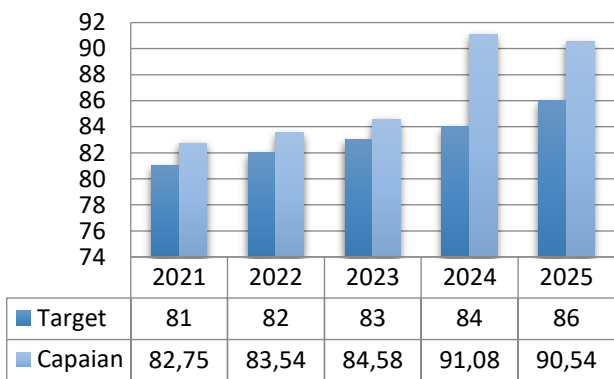
Pada triwulan ketiga (Juli–September), capaian kinerja kembali menunjukkan performa yang baik. Juli dan September mencapai 91,75, meskipun sempat turun pada Agustus ke 89,00 (terendah sepanjang tahun). Secara umum, triwulan ini tetap memperlihatkan konsistensi di atas angka 90 dengan fluktuasi yang masih terkendali.

Sementara itu, triwulan keempat (Oktober–Desember) menunjukkan stabilitas yang cukup baik meskipun berada sedikit di bawah puncak capaian. Oktober dan November mencatat nilai 89,50, kemudian meningkat menjadi 90,50 pada Desember. Meskipun tidak setinggi capaian maksimum 91,75, performa tetap berada pada kategori baik dan relatif stabil menjelang akhir tahun.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan pola fluktuatif namun konsisten pada level tinggi. Nilai tidak pernah turun di bawah 89,00 dan beberapa kali mencapai 91,75. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan operasional PPS Bungus berjalan efektif, dengan kemampuan menjaga stabilitas kinerja sepanjang tahun meskipun menghadapi dinamika per periode.

Tabel 13. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
82,75	83,54	84,58	91,08	90,54	86	90,54	105,28	81	90,54

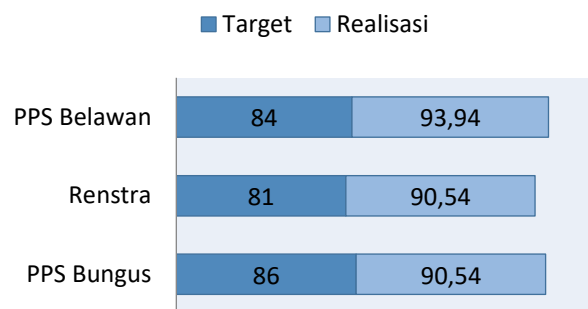


Gambar 11. Capaian PPS Bungus tahun 2021-2025

yang ditetapkan sebesar 84, atau setara dengan 108,43%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 84,58 dari target 83 (101,90%), serta lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi operasional, serta pengelolaan sumber daya yang semakin baik di PPS Bungus.

Namun demikian, pada tahun 2025 meskipun realisasi capaian tetap berada di atas target, terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 90,54 dari target 86 atau sekitar 105,28%. Meskipun menurun, capaian ini masih menunjukkan kinerja yang sangat baik karena tetap melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa PPS Bungus mampu menjaga stabilitas kinerja dan mempertahankan efektivitas pengelolaan pelabuhan secara berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam periode 2021–2025. Berdasarkan data tersebut, realisasi capaian setiap tahun terus mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024. Pada tahun 2024, tingkat pencapaian mencapai 91,08 dari target



Gambar 12. Perbandingan Capaian

Jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Strategis (Renstra), capaian PPS Bungus tahun 2025 juga telah melampaui target akhir Renstra yang sebesar 81 dengan realisasi 90,54. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis serta efektivitas implementasi kebijakan dan program yang dijalankan.

Selanjutnya, berdasarkan perbandingan dengan satuan kerja lainnya, kinerja PPS Bungus masih menunjukkan performa yang kompetitif. Meskipun capaian PPS Belawan pada periode yang sama tercatat lebih tinggi, PPS Bungus tetap berada di atas target Renstra serta menunjukkan konsistensi dalam peningkatan kinerja. Keberhasilan ini menegaskan bahwa PPS Bungus terus mengalami peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan, dan operasional pelabuhan, sehingga mampu mencapai dan melampaui target yang ditetapkan secara berkelanjutan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi indikator tingkat kinerja pelabuhan didukung oleh kedisiplinan tim dalam melakukan penginputan data setiap bulannya, serta adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh pimpinan. Pembagian tugas penginputan dan monitoring oleh setiap petugas dalam tim kerja OPK, TKPU, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial yang juga turut berkontribusi dalam pencapaian ini.

Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang harus diatasi, yaitu frekuensi pengiriman data di aplikasi PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan) yang masih belum maksimal. Upaya peningkatan diperlukan untuk mencapai nilai optimal. Walaupun terdapat kendala ini, sinergitas dalam penginputan data telah dilaksanakan dengan baik, sehingga realisasi indikator tetap dapat dicapai meski belum mencapai nilai maksimal.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU tingkat operasional pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan dalam hal pengelolaan dan operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 14. Analisa Efisiensi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	104,45%	7.620.419.000	7.694.952.203	7.959.527.646	264.575.443
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				3,47%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{18,69\%}{20} \times 50\right)$				58,68%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.620.419.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir 2025 mencapai Rp 7.694.952.203 atau 100,98% dengan efisiensi 3,47% dan nilai efisiensi 58,68%.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Tingkat Operasional pelabuhan didukung oleh tim penginput PIPP yang bertugas untuk melakukan input data pada masing-masing kriteria yang dinilai pada aplikasi PIPP, setiap kriteria pada aplikasi PIPP memiliki penanggungjawab yang bisa berasal dari kelompok kerja yang berbeda, disesuaikan dengan kriteria tersebut.

Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

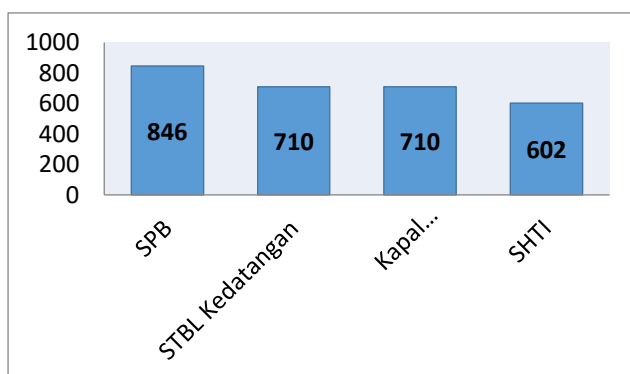
Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator yang menunjukkan :

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (SPB), yaitu jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan.
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan, yaitu jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan.
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan, yaitu jumlah permintaan verifikasi SHTI dibagi dengan jumlah SHTI yang diterbitkan.

Target dan Realisasi

Tabel 15 Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

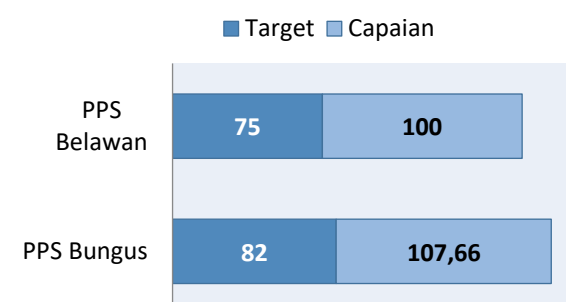
SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2021- 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus		
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
-	-	93,75	100,55	107,66	82	107,66	131,29	-	-	



Gambar 14. Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2025

mencapai 131,29%. Hal ini menunjukkan bahwa PPS Bungus mampu melampaui target yang telah ditentukan dengan selisih realisasi sebesar 25,66 poin dari target.

Realisasi indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran tahun 2025 pada PPS Bungus menunjukkan capaian sebesar 107,66% dari target yang ditetapkan sebesar 82, sehingga persentase capaian



Gambar 13. Perbandingan dengan Satker Lain

Sementara itu, PPS Belawan mencatat realisasi sebesar 100% dari target 75, dengan persentase capaian sebesar 133,33%. Secara nilai realisasi, PPS Bungus lebih tinggi dibandingkan PPS Belawan dengan selisih 7,66 poin. Namun demikian, secara persentase capaian terhadap target, PPS Belawan sedikit lebih unggul dengan selisih sekitar 2,04%. Perbedaan ini dipengaruhi oleh besaran target masing-masing satuan kerja, di mana target PPS Belawan lebih rendah dibandingkan PPS Bungus, sehingga persentasenya menjadi relatif lebih tinggi.

Pada Gambar 15, pelayanan kesyahbandaran tahun 2025 ditunjukkan melalui beberapa indikator operasional, yaitu penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) sebanyak 846 dokumen, penerbitan STBL Kedatangan sebanyak 710 dokumen, pelayanan Kapal Keluar sebanyak 710 kegiatan, serta penerbitan SHTI sebanyak 602 dokumen. Data ini menunjukkan bahwa volume pelayanan tertinggi terdapat pada penerbitan SPB, yang menjadi indikator utama dalam aktivitas kesyahbandaran. Tingginya jumlah SPB mencerminkan kelancaran proses administrasi dan operasional kapal, serta tingkat kepatuhan dokumen kapal yang beroperasi.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan kesyahbandaran tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan kedua satker sama-sama melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat perbedaan persentase capaian, hal tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan target awal dan volume pelayanan masing-masing pelabuhan. Capaian ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta dukungan administrasi dan operasional yang optimal dalam menunjang kegiatan kepelabuhanan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di dukung dengan kinerja tim kesyahbandaran dalam menghimbau para pemilik ataupun pengurus kapal perikanan yang akan melakukan docking di kolam pelabuhan untuk mengurus dan melengkapi surat perizinan dengan lengkap. Realisasi ini juga didukung dengan adanya kesadaran pemilik kapal dalam mengajukan permohonan SPB, STBLK kedatangan kapal dan SHTI yang semakin meningkat.

Sementara dalam upaya pencapaian realisasi indikator ini, yang menjadi penghambat keberhasilan adalah masih ada kapal-kapal di kolam pelabuhan yang akan Docking namun belum memiliki dokumen yang lengkap.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan tersebut. Tata kelola yang baik melibatkan penerapan prosedur dan kebijakan yang jelas serta transparan, yang memastikan setiap aspek pelayanan kesyahbandaran berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, operasional kesyahbandaran yang efektif mencakup pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pemeliharaan infrastruktur yang memadai, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi dan operasional. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pihak pelabuhan, pengguna jasa, dan otoritas maritim, juga memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran operasional kesyahbandaran.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 16. Analisa Efisiensi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	131,29%	17.474.000	17.362.560	22.938.945	5.576.385
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				31,92%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{36,39\%}{20} \times 50 \right)$				129,80%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.474.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir 2025 mencapai Rp 17.362.560 atau 99,36% dengan efisiensi 31,92% dan nilai efisiensi 129,80%.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal dan terlatih. Tim kerja Kesyahbandaran di PPS Bungus terdiri dari 10 personil yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan kesyahbandaran dengan optimal. Keberadaan tim ini memastikan bahwa proses pelayanan, seperti penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) dan berbagai prosedur kesyahbandaran lainnya, dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Dengan adanya SDM yang kompeten dan berdedikasi, PPS Bungus mampu mencapai tingkat pelayanan yang baik, yang tercermin dalam capaian kinerja yang tinggi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan adalah kawasan yang mencakup daratan dan perairan di sekitarnya, dengan batas-batas tertentu, yang digunakan sebagai tempat untuk berbagai kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan. Di dalam pelabuhan perikanan, kapal perikanan dapat bersandar, berlabuh, dan/atau melakukan bongkar muat ikan, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Untuk mendukung fungsi tersebut, setiap pelabuhan perikanan harus memiliki fasilitas yang terbagi dalam tiga kategori: fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

Dalam rangka menunjang operasi pelabuhan perikanan, pengembangan fasilitas menjadi sangat penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

yang ada. Realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus dihitung dengan membandingkan jumlah pengembangan fasilitas yang telah dilaksanakan dengan masterplan atau draft perubahan masterplan PPS Bungus. Dengan cara ini, dapat diketahui sejauh mana pengembangan fasilitas di PPS Bungus telah sesuai dengan rencana yang telah disusun dan memastikan pelabuhan ini dapat terus beroperasi dengan optimal untuk mendukung kegiatan perikanan.

Target dan Realisasi

Tabel 17 Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

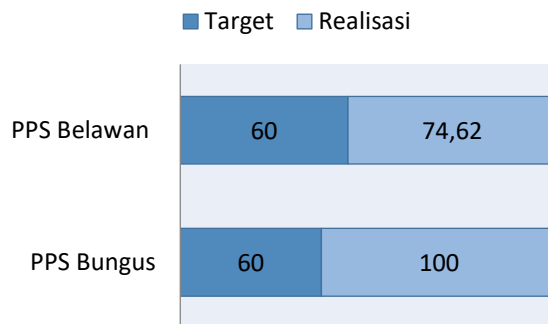
SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	80	100	100	60	100	166,67	-	-

Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 166,67%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 60%. Realisasi tahun 2025 tercatat 100%, sehingga melampaui target sebesar 106,67 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian pengembangan fasilitas di PPS Bungus berjalan sangat optimal dan melampaui ekspektasi kinerja yang telah direncanakan. Perhitungan tersebut didasarkan pada perbandingan antara jumlah fasilitas yang telah direalisasikan dan dimanfaatkan hingga tahun 2025 dengan jumlah fasilitas yang direncanakan dalam dokumen perencanaan (target kinerja). Dengan realisasi penuh (100%) terhadap target 60%, tingkat efektivitas pelaksanaan program tergolong sangat tinggi.

Adapun beberapa kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas yang direalisasikan pada tahun 2025 antara lain:

1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
2. Pemeliharaan Vessel Lift
3. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
4. Pemeliharaan Portal Gate
5. Pemeliharaan Vessel Lift
6. Pemeliharaan Pos Jaga
7. Pemeliharaan Jaringan Air
8. Pemeliharaan AC
9. Pemeliharaan Panel Listrik Dermaga
10. Pemeliharaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen
11. Pemeliharaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, tren kinerja menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023 realisasi tercatat sebesar 80%, meningkat menjadi 100% pada tahun 2024 dan tetap terjaga 100% pada tahun 2025. Dibandingkan tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 20 poin persentase, yang mencerminkan konsistensi dan penguatan pengendalian pengembangan fasilitas secara berkelanjutan. Dalam perbandingan dengan satuan kerja lain, yaitu PPS Belawan, kedua pelabuhan sama-sama mencatat realisasi tahun 2025 sebesar 100%. Namun secara persentase capaian terhadap target, terdapat perbedaan. PPS Belawan memiliki target yang sama yaitu 60%, dengan realisasi 74,62% (124,37% terhadap target), sedangkan PPS Bungus mencapai 100% (166,67% terhadap target). Dengan demikian, secara persentase capaian kinerja, PPS Bungus lebih tinggi sebesar 42,30 poin persentase dibandingkan PPS Belawan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian dan pemanfaatan fasilitas di PPS Bungus pada tahun 2025 lebih optimal dalam melampaui target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam mendukung operasional pelabuhan perikanan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui pengembangan serta pemeliharaan fasilitas yang terencana dan terukur.



Gambar 15. Perbandingan dengan Satker Lain

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pelaksanaan pengembangan fasilitas yang sesuai dengan masterplan. Namun, salah satu faktor penghambat keberhasilan indikator ini adalah terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan yang diperlukan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur. Meskipun terdapat tantangan dalam pencapaian indikator ini, PPS Bungus telah berupaya mengoptimalkan kegiatan pengembangan fasilitas dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator persentase pengendalian pengembangan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sangat bergantung pada berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu faktor utama yang berperan adalah pelaksanaan pengembangan, perbaikan, serta rehabilitasi fasilitas pelabuhan perikanan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang tersedia mampu mendukung sistem Penangkapan Ikan Terukur secara optimal. Dengan adanya pengembangan yang tepat, fasilitas pelabuhan dapat memenuhi standar operasional yang lebih baik, meningkatkan efisiensi kegiatan perikanan, serta memberikan manfaat langsung bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Sebaliknya, jika program perbaikan dan rehabilitasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menghambat operasional pelabuhan, menurunkan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan, serta berdampak pada rendahnya pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program-program ini menjadi kunci dalam mencapai target pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan secara efektif dan berkelanjutan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	166,67%	1.871.538.000	1.868.640.689	3.119.292.385	1.250.651.696
$Efisiensi RO Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				66,81%	
$Nilai Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{100,67\%}{20} \times 50 \right)$				217,03%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.871.538.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir 2025 mencapai Rp 1.868.640.689 atau 99,85% dengan efisiensi 66,81% dan nilai efisiensi 217,03%.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, khususnya dari tim kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Tim ini terdiri dari delapan orang pegawai yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan pengembangan fasilitas pelabuhan. Dengan adanya tim ini, berbagai kegiatan seperti pengembangan, perbaikan, dan rehabilitasi infrastruktur pelabuhan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

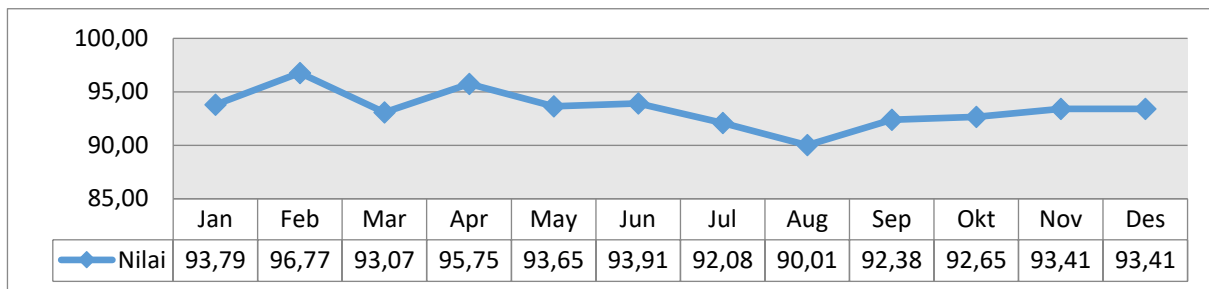
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.

Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

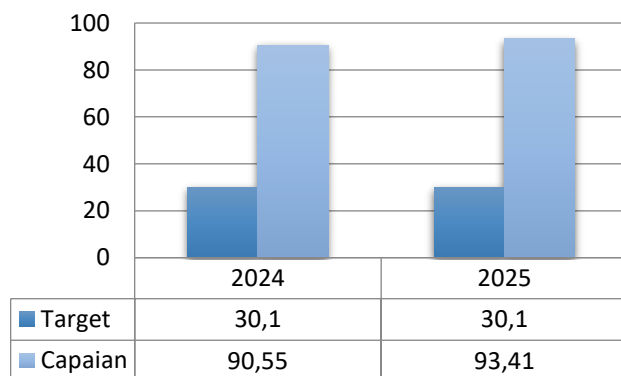
Target dan Realisasi

Tabel 18 Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	36,27	90,55	93,41	30,10	93,41	310,37	-	-



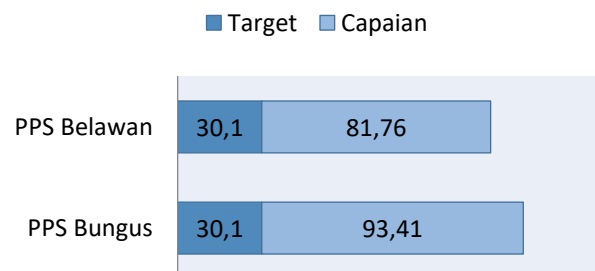
Gambar 16. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN tahun 2025



Gambar 17. Perbandingan Dengan Tahun 2024

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024, hal ini disebabkan karena sudah optimalnya penginputan indikator program mandatory maupun program voluntary pada aplikasi SELARASKAN sehingga nilai yang didapat lebih maksimal.

Capaian indikator kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2025 berada dalam kategori Sangat Baik, dengan skor 90,55 dan persentase mencapai 310,37% dari total target. Dengan demikian, capaian sampai triwulan IV tahun 2025 sudah melampaui target yang ditetapkan, baik untuk triwulan maupun tahunan. Jika



Gambar 18. Perbandingan dengan Satker Lain

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkontribusi dalam penilaian. Salah satu faktor pendukung utama adalah terbentuknya tim penginputan yang bertanggung jawab untuk mengisi setiap evidence dalam aplikasi SELARASKAN.

Setiap anggota tim memiliki peran dalam memastikan kelengkapan data terkait program mandatory dan program evidence, serta menginput hasilnya ke dalam aplikasi SELARASKAN. Dengan adanya sistem ini, terjadi perbaikan yang signifikan pada tahun 2025, sehingga nilai indikator kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Namun, pencapaian IK 7 masih menghadapi tantangan, terutama karena fluktuasi nilai yang dipengaruhi oleh kriteria dan data dukung dalam aplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut agar tim yang dibentuk dapat benar-benar mewakili dan mengelola setiap data dukung pada setiap kriteria yang digunakan dalam penilaian.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Pelaksanaan layanan dukungan Aplikasi SELARASKAN memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian IK 7 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Keberhasilan pencapaian didukung oleh evaluasi berkelanjutan yang memungkinkan pemantauan secara real-time, sehingga tim dapat segera melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan. Selain itu, adanya tim penginputan yang terorganisir dan mewakili masing-masing evidence mempermudah proses pengisian data secara akurat dan tepat waktu. Dengan sistem ini, akurasi data meningkat, dan evidence yang dibutuhkan dalam evaluasi lebih terdokumentasi dengan baik, sehingga target nilai dapat dicapai.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 19. Analisa Efisiensi Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	309,50%	50.614.000	50.464.807	156.650.330	106.185.523
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				209,86%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{200,86\%}{20} \times 50\right)$				574,65%	

Upaya mendukung indikator kinerja nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.614.000 dan sampai akhir tahun 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 50.464.807 atau 99,71% dengan efisiensi 209,86% dan nilai efisiensi 574,65%.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian IK 7 didukung oleh kontribusi SDM dari tim kerja sarana dan prasarana pelabuhan, yang berperan aktif dalam memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan infrastruktur untuk mendukung target yang telah ditetapkan.

Sasaran Kinerja (SK) 4: Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja kelima (SK-4) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

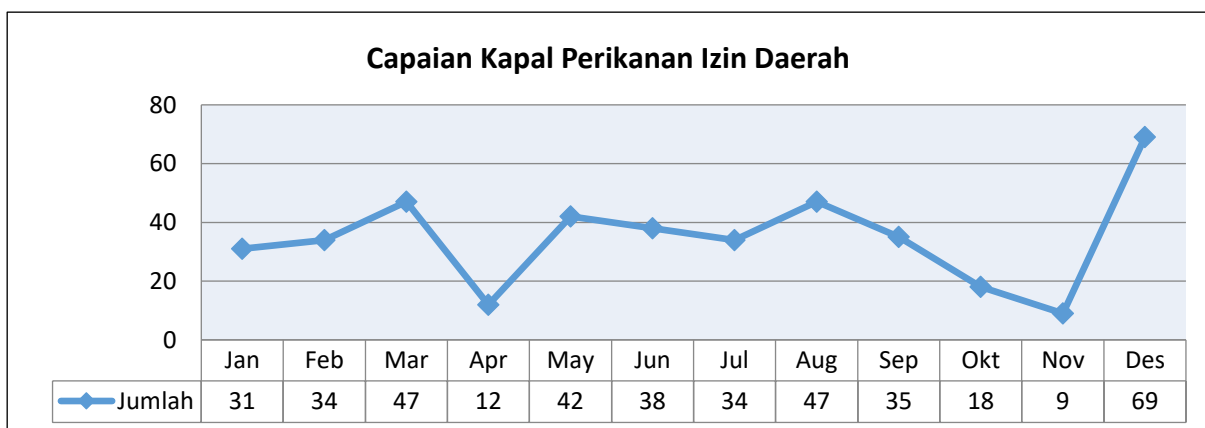
Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan, perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

Indikator kinerja Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan merupakan jumlah dokumen kapal perikanan oleh PPS Bungus dengan formula perhitungan yaitu nilai posisi akhir jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan.

Target dan Realisasi

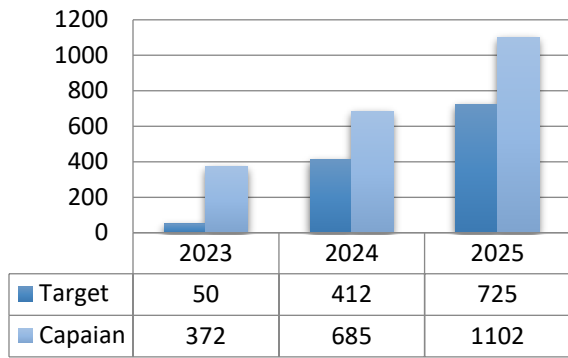
Tabel 20 Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

SK 5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	376	372	685	1.102	725	1.102	151,93	-	-



Gambar 19. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah

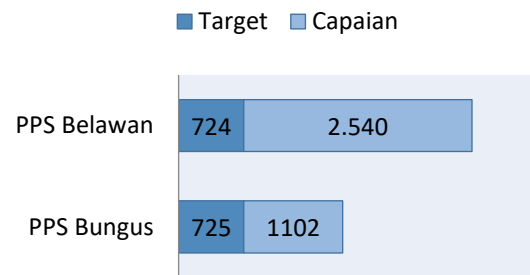
Hingga triwulan IV tahun 2025, capaian indikator kinerja utama kapal perikanan berizin daerah yang memenuhi ketentuan mencapai 1.102 unit, setara dengan 151,93 % dari target tahun 2025. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus turut mendukung operasional kapal perikanan dengan menerbitkan SKKP untuk dua provinsi, yakni Sumatera Barat dan Bengkulu.



Gambar 20. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

juga mencatat angka tertinggi, yaitu 1102, yang jauh melampaui capaian tahun 2023 sebesar 372 dan capaian tahun 2024 sebesar 685. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang lebih optimal, baik dari segi manajemen maupun implementasi program, untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, baik target maupun capaian pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan mencapai 725, meningkat secara drastis dibandingkan target tahun 2023 yang hanya sebesar 372 dan tahun 2024 sebesar 685. Capaian pada tahun 2025



Gambar 21. Perbandingan dengan Satker Lain

Jika dibandingkan dengan Satuan Kerja lain, yaitu PPS Belawan, dari segi jumlah capaian, PPS Bungus menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan PPS Belawan. Namun, jika dilihat dari persentase capaian terhadap target, PPS Bungus lebih unggul dengan persentase capaian sebesar 151,93%, sementara PPS Belawan hanya mencapai 350,83%. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan target yang ditetapkan antara PPS Bungus dan PPS Belawan. Meskipun jumlah capaian PPS Bungus lebih rendah, tingkat keberhasilan dalam memenuhi targetnya menunjukkan performa yang lebih efektif dan efisien dibandingkan PPS Belawan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan Indikator Kinerja (IK) 8 mencakup: 1) tingginya antusiasme pemilik kapal perikanan dalam melaporkan pengajuan pemeriksaan kapal, yang berperan signifikan dalam memastikan realisasi indikator ini; dan 2) dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan penerbitan SKKP, yang memungkinkan pelaksanaan pengecekan dan pemeriksaan kapal perikanan dilakukan secara optimal. Namun, pada tahun 2025, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu tidak adanya petugas pengecekan di Area Bengkulu karena sedang menjalani tugas belajar. Situasi ini menyebabkan proses pengecekan kapal dan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan di Bengkulu mengalami sedikit hambatan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, yaitu adanya pelaksanaan implementasi kebijakan bidang kapal perikanan. Implementasi tersebut berupa pemeriksaan kelaikan, pengukuran, pengujian, dan inspeksi kapal perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan yang akan diterbitkan dokumennya memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 21. Analisa Efisiensi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	152%	-	-	-	-
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{66,28\%}{20} \times 50\right)$				-	

Indikator kinerja Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 152% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemenuhan ketentuan perizinan kapal perikanan daerah berjalan efektif dan melampaui target yang direncanakan.

Pada indikator ini tidak dialokasikan anggaran secara langsung (non-budgeter), sehingga kolom alokasi dan realisasi anggaran tidak diisi. Meskipun demikian, kinerja tetap dapat dicapai secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta sinergi dengan kegiatan lain yang relevan.

Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, ditetapkan petugas Kelaikan Kapal sebanyak 9 (sembilan) orang pegawai yang telah menerima Diklat petugas kelaikan kapal Perikanan. Sembilan petugas tersebut berasal dari jabatan dan tupoksi yang berbeda-beda sehingga adanya rangkap tugas.

Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengendalian usaha subsektor penangkapan ikan dan usaha subsektor pengangkutan ikan, khususnya tata kelola Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan Kapal Perikanan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya ikan. Kapal Perikanan sebagai sarana produksi memiliki dua elemen, yakni elemen fisik dan elemen personel.

Kegiatan pemenuhan kompetensi kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan bagi awak kapal perikanan, selain dilaksanakan melalui diklat, dapat juga dilaksanakan melalui bimbingan teknis dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Pasal 146 sampai dengan pasal 149. Pada tahun 2024 pelaksanaan IK Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan merupakan

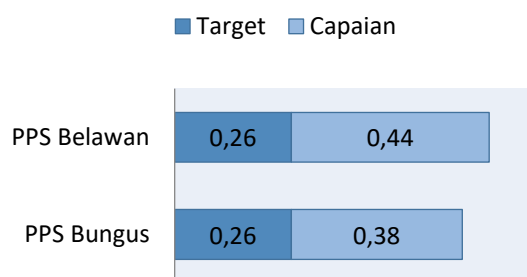
indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Metode penghitungan IK 9 dengan membandingkan jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-Pkl/PKL dan sudah tersertifikasi dibagi jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL/PKL.

Target dan Realisasi

Tabel 22 Capaian Indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.

SK 4		Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 9		Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.							
Realisasi Tahun 2021- 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	0,26	0,38	146,15	-	-

Pada tahun 2025, capaian Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan mencapai 0,38 atau sebesar 146,15% dari target yang telah ditetapkan sebagai Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.



Gambar 22. Perbandingan dengan Satker Lain

Jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, capaian PPS Bungus masih lebih rendah dengan selisih sebesar 23,08%. PPS Belawan mencatat capaian sebesar 0,44 yang lebih tinggi dibandingkan PPS Bungus.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian indikator kinerja ini didukung oleh dua faktor utama. Pertama, meningkatnya kesadaran awak dan pemilik kapal perikanan tentang pentingnya kompetensi, asuransi jiwa, dan pelaksanaan Pas Kecil Laut (PKL), yang mendorong partisipasi dalam program sertifikasi dan perlindungan. Kedua, sosialisasi dan pendekatan langsung yang terus dilakukan turut memperkuat pemahaman serta keterlibatan mereka. Dengan faktor-faktor ini, diharapkan pencapaian indikator kinerja terus meningkat seiring optimalisasi program pembinaan dan perlindungan awak kapal perikanan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan perlindungan nelayan serta awak kapal perikanan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan fasilitas dan program pembinaan peningkatan kompetensi. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan teknis bagi awak kapal, sosialisasi terkait keselamatan kerja dan perlindungan asuransi, serta pemberian sertifikasi bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan. Fasilitas yang memadai, termasuk akses terhadap pelatihan dan kemudahan dalam proses perizinan serta sertifikasi, berperan penting dalam meningkatkan

capaian indikator kinerja. Sebaliknya, jika fasilitas dan program pembinaan tidak berjalan optimal—baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi nelayan, atau kendala administratif—maka pencapaian indikator dapat terhambat. Oleh karena itu, keberlanjutan dan efektivitas program pembinaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kompetensi serta perlindungan bagi nelayan dan awak kapal perikanan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 23. Analisa Efisiensi Persentase Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	146,15%	-	-	-	-
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				-	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{32,84\%}{20} \times 50 \right)$				-	

Indikator kinerja Persentase Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 146,15% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan awak kapal perikanan terhadap persyaratan bekerja telah melampaui target yang direncanakan.

Pada indikator kinerja ini tidak dialokasikan anggaran secara langsung (non-budgeter), sehingga kolom alokasi dan realisasi anggaran tidak diisi. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan secara efektif melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia dan dukungan dari kegiatan lain yang terkait.

Sumber Daya Manusia

Upaya pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan oleh tim kerja kesyahbandaran pelabuhan yang berjumlah 11 orang, terdiri dari 2 (dua) orang Syahbandar Pelabuhan Perikanan, 3 (tiga) pengelola syahbandar, 2 (dua) Penata Kelola Kelautan Dan Perikanan, 3 (tiga) orang P3T Pertama, dan 1 (satu) orang AP3T.

Sasaran Kinerja (SK) 5: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kinerja ketujuh (SK-7) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis, predikat ini merupakan hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Unit kerja yang mendapatkan predikat WBK harus memenuhi sebagian besar kriteria tersebut, termasuk manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Target dan Realisasi

Tabel 24 Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

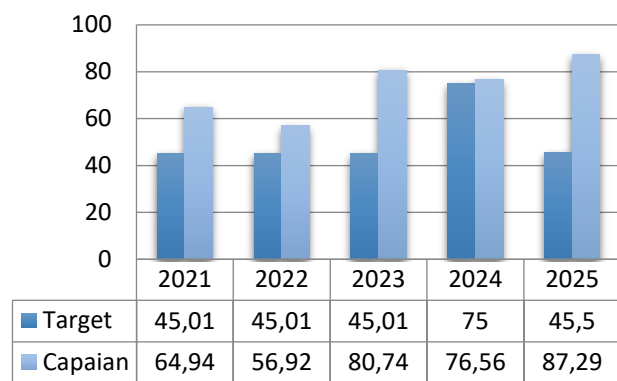
SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 10	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
64,94	56,92	80,74	76,56	87,29	45,5	87,29	191,85	85	87,29

Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT	60.00					
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.33	2.75	6.08	76.06%	OK
2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	3.50	2.67	6.17	88.12%	OK
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.01	3.50	7.51	75.06%	OK
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	4.32	4.51	8.83	88.29%	OK
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	6.05	5.63	11.67	77.81%	OK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.31	4.59	8.89	88.94%	OK
TOTAL PENGUNGKIT				49.15	81.92%	OK
B. HASIL	40.00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50			21.21	94.25%	OK
a. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	17.50			17.46	99.75%	OK
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00			3.75	75.00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50			16.93	96.75%	
- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50			16.93	96.75%	OK
TOTAL HASIL				38.14	95.34%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				87.29		OK

Tabel 25. Hasil Penilaian LKE WBK PPS Bungus

Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada tahun 2025 mencapai 87,29, atau setara dengan 191,85% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam melampaui target yang telah direncanakan, mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Nilai tersebut diperoleh melalui proses Penilaian Zona Integritas mandiri mengacu pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen Pengungkit (60%) dan komponen Hasil (40%). Komponen Pengungkit mencakup berbagai aspek strategis seperti manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, serta pengawasan.

Sementara itu, komponen Hasil menilai dampak nyata dari implementasi reformasi birokrasi, termasuk kepuasan masyarakat dan efektivitas layanan yang diberikan oleh PPS Bungus.



Gambar 23. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2025

pada pemenuhan indikator dasar, seperti penataan tata kelola organisasi, penguatan akuntabilitas, serta pembangunan budaya kerja berintegritas.

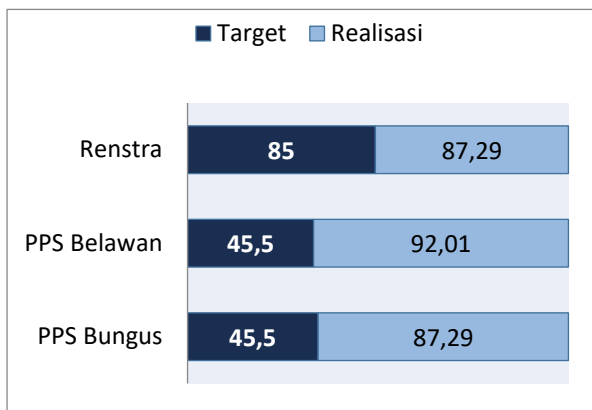
Meskipun target yang ditetapkan masih pada level awal, capaian PPS Bungus pada tahun 2021–2023 secara konsisten melampaui target. Capaian masing-masing tahun tercatat sebesar 64,94 pada tahun 2021, 56,92 pada tahun 2022, dan 80,74 pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari PPS Bungus dalam membangun Zona Integritas, meskipun masih berada pada fase penguatan fondasi organisasi. Pada periode ini, capaian dihitung melalui mekanisme penilaian mandiri yang dilakukan bersama tim Ortala DJPT, dengan penekanan pada pemenuhan indikator-indikator awal pembangunan Zona Integritas.

Pada tahun 2024, PPS Bungus memasuki tahapan yang lebih lanjut, yang ditandai dengan peningkatan target secara signifikan menjadi 75. Kenaikan target ini mencerminkan meningkatnya ekspektasi terhadap kualitas tata kelola dan pelayanan publik seiring dengan proses pencanangan menuju WBK. Pada tahun tersebut, PPS Bungus berhasil mencapai nilai 76,56, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini diperoleh melalui proses evaluasi yang lebih komprehensif, yaitu melalui asistensi dan pendampingan bersama Inspektorat Jenderal V KKP, sehingga hasil penilaian menjadi lebih objektif dan terukur.

Selanjutnya, pada tahun 2025, target PPS Bungus kembali disesuaikan menjadi 45,50, sejalan dengan kebijakan penetapan indikator kinerja pada periode tersebut. Dengan target tersebut, PPS Bungus mampu mencatatkan capaian sebesar 87,29, yang menunjukkan kinerja sangat baik dan jauh melampaui target tahunan. Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa upaya pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian PPS Bungus pada tahun 2025 telah melampaui target Renstra, dengan realisasi sebesar 87,29 dibandingkan target 85. Hal ini menunjukkan bahwa PPS Bungus tidak hanya berhasil memenuhi target perencanaan strategis, tetapi juga mampu melampauinya.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa pada periode 2021–2023, PPS Bungus masih berada pada tahap awal pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal tersebut tercermin dari target tahunan yang relatif rendah dan stabil, yaitu sebesar 45,01 pada masing-masing tahun. Penetapan target ini menunjukkan bahwa fokus PPS Bungus pada periode tersebut masih diarahkan



Gambar 24. Perbandingan Capaian

Sementara itu, jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, seperti PPS Belawan, capaian PPS Bungus relatif lebih rendah. PPS Belawan mencatatkan capaian sebesar 92,01 dengan target 45,50, sedangkan PPS Bungus mencapai 87,29 dengan target yang sama. Perbedaan ini menunjukkan variasi tingkat capaian antar Satker, yang dipengaruhi oleh kondisi internal, fokus pengembangan, serta strategi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di masing-masing unit kerja.

Secara keseluruhan, tren capaian PPS Bungus yang secara konsisten melampaui target tahunan menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam membangun Zona Integritas, meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan peningkatan target dan tahapan pembangunan WBK yang lebih lanjut.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dari kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- Terlaksananya Asistensi WBK: Proses asistensi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) telah berhasil dilaksanakan dengan pendampingan dari Tim Inspektorat Jenderal V Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui asistensi ini, diperoleh hasil penilaian mandiri yang dilakukan bersama tim asistensi. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aspek-aspek yang telah memenuhi standar serta area yang masih memerlukan perbaikan.
- Sinergitas dan Kolaborasi Antarbagian: Keberhasilan lainnya ditandai dengan adanya sinergitas yang kuat antara seluruh bagian dalam upaya pelaksanaan kegiatan. Seluruh dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses evaluasi dan penilaian dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
- Efektivitas Tim dan Kepatuhan terhadap SOP: Tim yang terlibat dalam kegiatan ini telah bekerja secara efektif dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini berkontribusi terhadap penyelesaian sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh tim asistensi dari Ortala DJPT. Kepatuhan terhadap SOP juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria evaluasi yang ditentukan.

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja, khususnya terkait dengan Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya inovasi yang dapat diterapkan di pelabuhan ini. Inovasi menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan zona integritas, baik dalam bentuk digitalisasi layanan, peningkatan transparansi, maupun efisiensi operasional.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus sangat dipengaruhi oleh berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu komponen

utama yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah kegiatan persiapan penetapan zona integritas menuju WBK, yang mencakup pemenuhan dokumen pendukung WBK, penguatan komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas, serta peningkatan sistem pengawasan internal yang transparan. Selain itu, pelaksanaan evaluasi dan penetapan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berperan dalam memperkuat implementasi tata kelola yang bersih dan akuntabel. PPS Bungus juga mengadakan berbagai kegiatan pendukung, seperti Forum Konsultasi Publik, yang menjadi wadah interaksi antara PPS Bungus dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengakomodasi masukan untuk perbaikan sistem. Selain itu, dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Zona Integritas guna memastikan efektivitas penerapan kebijakan dan keberlanjutan reformasi birokrasi. Keseluruhan program ini bertujuan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 26. Analisa Efisiensi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	191,85%	1.970.000	1.780.000	3.779.445	1.999.445
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				101,49%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{2,43\%}{20} \times 50 \right)$				56,08%	

Upaya mendukung indikator kinerja Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.970.000 dan sampai akhir tahun 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.780.000 atau 90,36% dengan efisiensi 101,49% dan nilai efisiensi 56,08%.

Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan, Kepala Pelabuhan mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pendukung yang terdiri dari 44 pegawai PPS Bungus, yang mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga Pramubakti. Optimalisasi sumber daya manusia ini dilakukan secara efisien dengan menerapkan sistem kerja yang fleksibel, di mana setiap pegawai tidak hanya menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), tetapi juga melaksanakan tanggung jawab tambahan dalam pemenuhan dokumen WBK. Pendekatan ini memungkinkan percepatan proses administratif dan memastikan bahwa seluruh persyaratan dapat terpenuhi dengan baik tanpa memerlukan tambahan tenaga kerja.

Selain itu, keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam proses ini juga mendorong budaya kerja kolaboratif, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, serta memperkuat komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, revidu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2024 s.d. triwulan IV tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Target dan Realisasi

Tabel 27 Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2025

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	92	88	100	85	100	117,65	-	-

Capaian indikator kinerja terkait persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Persentase pemanfaatan rekomendasi mencapai 100%, atau setara dengan 117,65% dari target yang telah ditetapkan, mencerminkan efektivitas dalam menindaklanjuti temuan pengawasan untuk peningkatan kualitas layanan dan operasional pelabuhan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan Indikator Kinerja (IK) 11 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat dijelaskan dengan beberapa poin utama. Pertama, adanya tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi yang muncul dari laporan Survei Kepuasan Masyarakat. Ini mencerminkan komitmen pelabuhan untuk merespons dan memperbaiki layanan berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna jasa. Kedua, pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi memberikan insentif positif yang mendorong peningkatan kinerja. Kriteria penilaian yang komprehensif, mencakup aspek kinerja, kehadiran, kerjasama, inovasi/kreativitas, serta rekam jejak yang bebas dari keluhan personal, memberikan landasan yang jelas untuk memotivasi dan menghargai kontribusi positif pegawai.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian ini adalah dengan pembentukan tim-tim bersinergi dan adanya pemenuhan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan adalah kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 28. Analisa Efisiensi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	117,65%	-	-	-	-
$Efisiensi RO Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				-	
$Nilai Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{10,05\%}{20} \times 50 \right)$				-	

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 117,65% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan telah dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan kinerja pengelolaan pelabuhan perikanan.

Indikator ini merupakan indikator non-budgeter, sehingga tidak didukung oleh alokasi dan realisasi anggaran secara langsung. Meskipun demikian, kinerja tetap dapat dicapai secara efektif melalui optimalisasi sumber daya yang ada, koordinasi antarunit kerja, serta komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

Sumber Daya Manusia

Dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP), Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial didukung oleh sumber daya manusia dari berbagai bagian, termasuk keuangan, Barang Milik Negara (BMN), tim Tata Kelola Sarana dan Prasarana, serta tim kerja Pelayanan Usaha. Seluruh tim bekerja secara sinergis untuk memastikan setiap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti dengan optimal, sehingga mendukung peningkatan tata kelola dan kinerja pelabuhan secara menyeluruh.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

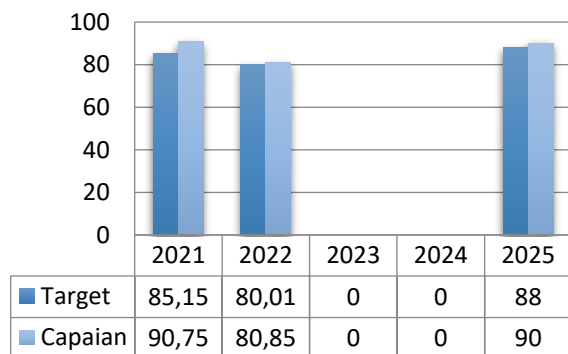
Indikator nilai SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan penilaian Kementerian PAN & RB atas akuntabilitas kinerja KKP. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Target dan Realisasi

Tabel 29 Capaian Indikator Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	80,85	-	-	90	88	90	102,27	-	-

Capaian indikator Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2025 adalah 90 dari target tahunan dengan persentase 102,27%. Capaian ini dipengaruhi dengan terpenuhinya dokumen SAKIP PPS Bungus



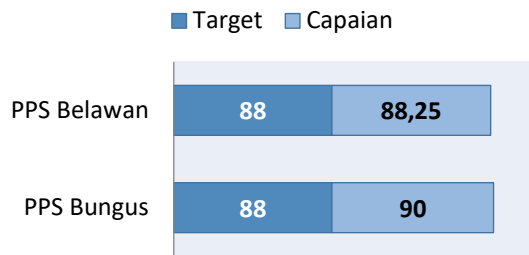
Gambar 25. Perbandingan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terlihat bahwa capaian nilai SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2021 capaian mencapai 90,75, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 80,85. Penurunan ini terjadi seiring dengan adanya perubahan dan penyempurnaan metode penilaian SAKIP, khususnya pada aspek kelengkapan dan kedalaman dokumen yang dinilai semakin

detail pada Tahun 2022, sehingga berdampak pada hasil evaluasi yang diperoleh.

Selanjutnya, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus melakukan perbandingan dengan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan sebagai unit kerja yang setara dalam lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan memiliki tingkat eselonisasi yang sama. Berdasarkan Gambar 28, capaian SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2025 sebesar 90, lebih tinggi dibandingkan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang mencapai 88,25. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah berada pada tingkat yang kompetitif dan mampu melampaui capaian unit kerja sejenis.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan



Gambar 26. Perbandingan dengan Satker Lain

Telah ditandatanganinya Perjanjian Kinerja yang berisi target indikator kinerja dan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala merupakan poin penting dalam keberhasilan pencapaian IKU tersebut.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Komponen kegiatan Perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap yang kegiatannya berupa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan perikanan tangkap adalah merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 30. Analisa Efisiensi Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	102,27%	200.000	200.000	204.540	4.540
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				2,27%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{15,1\%}{20} \times 50 \right)$				87,75%	

Upaya mendukung indikator kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000 dan sampai akhir tahun 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000 atau 100% dengan efisiensi 2,27% dan nilai efisiensi 87,75%.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam mendukung tercapainya indikator kinerja ini tergabung dalam Tim Pengelola Kinerja PPS Bungus, yang terdiri dari 10 orang anggota tim kerja. Selain itu, terdapat juga dukungan dari pegawai yang tergabung dalam Tim PM SAKIP Pelabuhan, yang berjumlah 6 orang. Para pegawai yang terlibat dalam kedua tim ini diberikan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), sebagai bentuk optimalisasi sumber daya yang tersedia. Meskipun tugas yang dijalankan tidak sepenuhnya sesuai dengan tupoksi utama mereka, komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh anggota tim memungkinkan pencapaian kinerja yang optimal. Dengan adanya keterlibatan SDM yang berdedikasi, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan tata kelola pelabuhan secara keseluruhan.

Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu:

- 1) **Kualifikasi**, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- 2) **Kompetensi**, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
- 3) **Kinerja**, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- 4) **Disiplin**, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

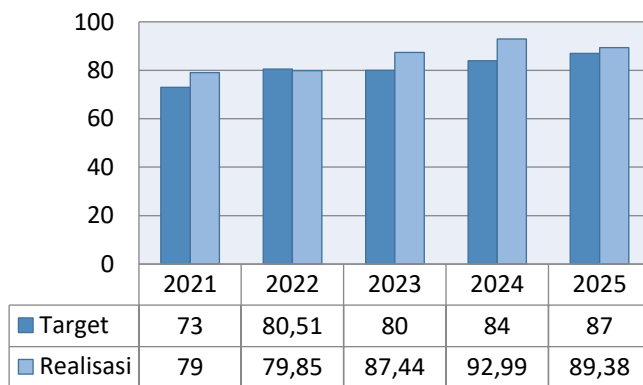
Target dan Realisasi

Tabel 31 Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
80,51	79,85	87,44	92,99	89,38	87	89,38	102,74	72	89,38

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan skor sebesar 89,38 atau setara dengan 102,74% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas dan kompetensi ASN dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, baik dalam aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, maupun kedisiplinan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya pengembangan SDM, termasuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembinaan, serta penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif. Dengan indeks profesionalitas yang terus meningkat, diharapkan ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat semakin berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi layanan, tata kelola yang lebih baik, serta mewujudkan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas.



Gambar 27. Capaian PPS Bungus Tahun 2021 - 2025

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menunjukkan tren peningkatan yang kuat dan berkelanjutan sepanjang periode 2021–2025. Pada tahun 2021, realisasi indeks mencapai 79, melampaui target sebesar 73. Meskipun pada tahun 2022 realisasi (79,85) sedikit berada di bawah target (80,51), kinerja kembali meningkat secara signifikan pada tahun-tahun

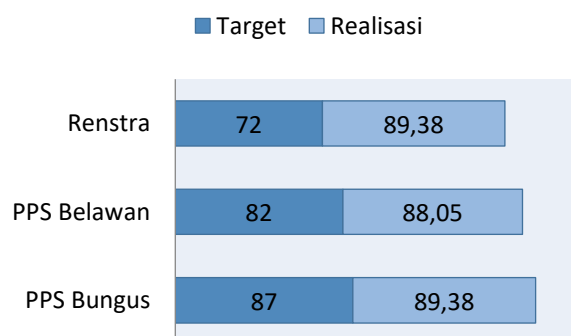
berikutnya. Pada tahun 2023, capaian indeks meningkat menjadi 87,44, melampaui target 80, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan realisasi 92,99 dari target 84, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode lima tahun. Pada tahun 2025, kinerja tetap terjaga dengan realisasi 89,38, masih berada di atas target 87, meskipun tidak setinggi capaian tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan keberhasilan berkelanjutan dalam peningkatan profesionalitas ASN di PPS Bungus.

Peningkatan capaian tersebut menunjukkan efektivitas berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti pengembangan kompetensi ASN, pembinaan berkelanjutan, serta penerapan sistem manajemen kinerja yang semakin baik. Konsistensi capaian di atas target pada sebagian besar periode penilaian menjadi indikator bahwa strategi peningkatan profesionalitas ASN telah berjalan secara optimal.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 30, capaian Indeks Profesionalitas ASN PPS Bungus mencapai 89,38 dari target 72, atau setara dengan 129,15%. Pencapaian ini menegaskan bahwa target Renstra tidak hanya tercapai, tetapi terlampaui secara signifikan.

Jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, seperti PPS Belawan, PPS Bungus juga menunjukkan kinerja yang lebih unggul. Realisasi indeks PPS Bungus (89,38) lebih tinggi dibandingkan PPS Belawan (88,05) maupun capaian Renstra secara umum. Keunggulan ini menegaskan bahwa upaya peningkatan profesionalitas ASN di PPS Bungus telah memberikan hasil yang relatif lebih optimal dibandingkan satker sejenis.

Keberhasilan tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi kebijakan yang lebih



Gambar 28. Perbandingan Capaian

efektif, serta pengelolaan kinerja yang berorientasi pada profesionalisme dan integritas, guna mendukung tata kelola pelabuhan yang semakin baik dan berfokus pada pelayanan publik yang optimal.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Beberapa usaha yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah dengan: 1) memberikan kesempatan ASN untuk menempatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Webinar/Seminar/Workshop /Magang/Sejenis; 2) memberikan himbauan dari bagian kepegawaian terkait pengembangan kompetensi pegawai, khususnya himbauan bagi pegawai yang belum mencapai 20 JP; 3) partisipasi aktif dari seluruh pegawai untuk mengikuti diklat/seminar/pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah perencanaan, pengembangan dan pembinaan Disiplin Pegawai. Selain itu kegiatan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui seminar, diklat, maupun bimbingan teknis baik secara online maupun *offline*.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	102,74%	77.435.000	76.814.024	79.557.719	2.743.695
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				3,54%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{13,17\%}{20} \times 50\right)$				82,93%	

Tabel 31 Analisa Efisiensi Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Upaya mendukung indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.435.000 dan sampai akhir tahun 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 76.814.024 atau 99,20% dengan efisiensi 3,54% dan nilai efisiensi 82,93%.

Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas (IP) ASN, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus didukung oleh seluruh pegawai yang berjumlah 59 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap pegawai dihimbau untuk secara aktif mengikuti berbagai macam pelatihan yang sesuai dengan jenis jabatan masing-masing. Partisipasi dalam pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai,

khususnya dalam memenuhi standar dimensi pendidikan dan pelatihan (diklat) minimal 20 Jam Pelajaran (JP). Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, pegawai diharapkan dapat mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mendukung peningkatan kualitas layanan, efektivitas kerja, serta pencapaian kinerja yang lebih optimal di PPS Bungus.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur tingkat transparansi dan kesiapan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyusunan dan publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). RUP merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan seluruh rencana kegiatan pengadaan barang/jasa selama satu tahun anggaran.

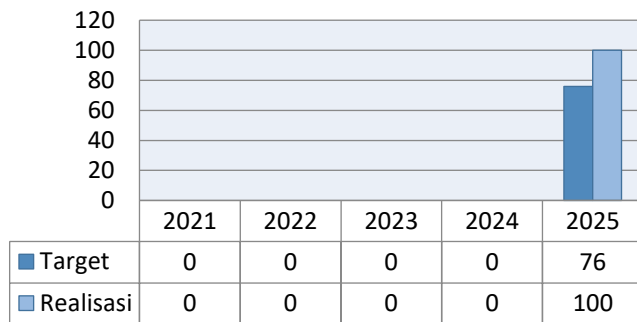
Publikasi RUP secara terbuka di SiRUP merupakan bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek akuntabilitas, efisiensi, dan keterbukaan informasi publik. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan membandingkan nilai total pengadaan barang/jasa yang telah diumumkan pada SiRUP dengan nilai total pagu pengadaan yang dikelola oleh unit kerja. Pagu pengadaan dihitung berdasarkan total anggaran program dikurangi belanja pegawai serta belanja non-pengadaan. Dengan demikian, semakin tinggi persentase RUP yang diumumkan di SiRUP, maka semakin baik kualitas perencanaan dan pengelolaan pengadaan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Penilaian terhadap IKU ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Pasal 11 Ayat (1), yang menegaskan bahwa pengumuman RUP wajib dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk menjamin prinsip transparansi dan keadilan dalam proses PBJ. Dengan indikator ini, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat memantau dan mengevaluasi kinerja perencanaan pengadaan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan PBJ direncanakan secara tepat waktu, sesuai aturan, dan terbuka untuk publik.

Target dan Realisasi

Tabel 32 Capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	76	76	100	131,58	-	-



Gambar 29. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2025

Capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2025 mencapai 100 atau 131,58% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan secara tepat waktu, lengkap, dan

melampaui ekspektasi kinerja yang diharapkan. Kinerja ini juga menunjukkan konsistensi yang baik sepanjang tahun 2025, sejalan dengan target peningkatan kualitas layanan dukungan manajerial di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Tidak terdapat data perbandingan untuk tahun sebelumnya, namun capaian ini menjadi indikator kuat bahwa sistem pengelolaan pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) telah berjalan optimal sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator dengan capaian 131,58% menunjukkan bahwa unit kerja memiliki efektivitas dan kesiapan tinggi dalam menyusun, mengumumkan, serta memperbarui paket-paket pengadaan secara tepat waktu. Keberhasilan ini juga mencerminkan kinerja manajerial dan koordinasi lintas unit yang baik dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan ini antara lain:

1. Koordinasi efektif antara unit perencanaan, keuangan, dan tim pengelola pengadaan barang/jasa.
2. Pemahaman yang kuat terhadap regulasi terbaru tentang penyusunan dan pengumuman RUP di SiRUP.
3. Ketersediaan data perencanaan yang lengkap sejak awal tahun, sehingga proses input dan pembaruan RUP berjalan lancar.
4. Komitmen pimpinan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan di lingkungan pelabuhan.

Meskipun capaian sudah melampaui target, potensi tantangan tetap perlu diantisipasi, seperti perubahan pagu anggaran atau kegiatan di tengah tahun, serta keterlambatan input akibat revisi program. Oleh karena itu, monitoring berkala dan pembaruan data RUP secara dinamis menjadi langkah penting untuk menjaga konsistensi capaian indikator di triwulan berikutnya.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini sangat didukung oleh program peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan digitalisasi sistem informasi pengadaan.

Beberapa kegiatan yang berperan penting antara lain:

- Pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi staf pengadaan terkait penyusunan dan pengelolaan RUP di SiRUP.

- Kegiatan koordinasi rutin antara unit perencanaan dan pengadaan untuk menyelaraskan data kebutuhan dengan anggaran yang tersedia.
- Pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang mempercepat proses publikasi dan pembaruan data RUP secara real-time.
- Penguatan kapasitas SDM pengadaan agar mampu menyesuaikan dengan sistem dan regulasi baru.

Dengan capaian yang melampaui target, PPS Bungus menunjukkan peningkatan nyata dalam aspek perencanaan, koordinasi, dan akuntabilitas publik. Hasil ini diharapkan dapat menjadi model keberhasilan dalam pengelolaan RUP di lingkungan pelabuhan perikanan lainnya.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 33. Analisa Efisiensi Tingkat Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	131,58%	-	-	-	-
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				-	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{20,48\%}{20} \times 50 \right)$				-	

Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 131,58% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.

Indikator ini merupakan indikator non-budgeter, sehingga tidak didukung oleh alokasi dan realisasi anggaran secara langsung. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal melalui pemanfaatan sistem yang ada, koordinasi internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh lima orang tim pengadaan, yang terdiri dari satu pejabat pengadaan dan empat orang panitia pengadaan yang mendapatkan penugasan tambahan dari atasan, karena bukan berasal dari jabatan pengelola PBJ.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Presentase Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

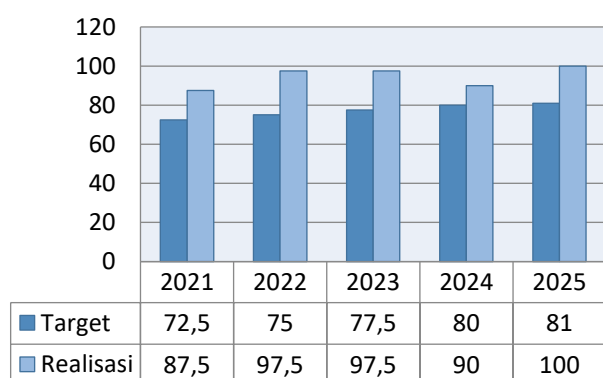
Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Unit Eselon I yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2020-2025 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2025 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Target dan Realisasi

Tabel 34 Capaian Indikator Presentase Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 15		Presentase Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus		
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
87,5	97,5	97,5	90	100	81	100	123,46	72,5	100	



Gambar 30. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2025

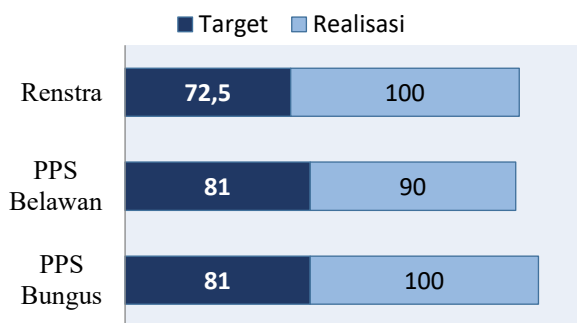
Berdasarkan Gambar 32, capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 81%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 mencapai 123,46% dari target yang direncanakan. Capaian ini diperoleh berdasarkan nilai indikator kinerja Eselon I

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), yang menjadi acuan penilaian bagi seluruh satuan kerja di lingkungannya.

Secara tren, capaian indikator kinerja PPS Bungus selama periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten, meskipun realisasi pada tahun 2025 (100%) mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 90% dengan target yang lebih rendah. Penurunan persentase capaian tahunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penyesuaian kebijakan pengelolaan BMN, meningkatnya kompleksitas pengelolaan aset, serta tantangan administratif yang berdampak pada tingkat kepatuhan pengelola BMN.

Selanjutnya, berdasarkan Gambar 33, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian indikator kinerja PPS Bungus tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target Renstra sebesar 72,5% menunjukkan tingkat pencapaian sebesar 137,93%, yang mencerminkan kinerja pengelolaan BMN yang sangat baik secara agregat.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa nilai capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada tahun 2025 sepenuhnya mengacu pada nilai capaian DJPT. Kondisi ini menyebabkan seluruh satuan kerja memiliki nilai capaian yang sama, sehingga perbandingan



Gambar 31. Perbandingan Capaian

capaian kinerja antar satuan kerja tidak dapat dilakukan secara objektif. Oleh karena itu, ke depan diperlukan evaluasi dan langkah strategis, baik dalam peningkatan kualitas pengelolaan BMN maupun dalam pengembangan metode penilaian kinerja yang lebih mencerminkan kondisi masing-masing satuan kerja, guna mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi pengelolaan BMN secara berkelanjutan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pembentukan tim pengelola BMN yang bertugas dalam perencanaan, pencatatan, pemeliharaan, dan pelaporan aset secara sistematis. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku turut berperan dalam memastikan kepatuhan yang tinggi. Penerapan prosedur yang tertib dan akuntabel dalam setiap tahapan pengelolaan aset menjadi faktor kunci dalam menjaga efisiensi serta transparansi dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di PPS Bungus.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja (IK) 15 dipengaruhi oleh berbagai program dan kegiatan, salah satunya adalah pelaporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Pelaporan keuangan yang tertib, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi faktor kunci dalam memastikan tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Ketepatan dalam pencatatan, validasi, dan pelaporan aset sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 35. Analisa Presentase Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Presentase Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	123,46%	416.120.000	416.103.440	513.720.952	97.617.512
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				23,47%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{12,5\%}{20} \times 50\right)$				81,25%	

Upaya mendukung indikator Presentase Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 416.120.000 dan sampai akhir tahun 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 416.103.440 atau 100,00% dengan efisiensi 23,47% dan nilai efisiensi 81,25%.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terdiri dari 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jabatan Pranata Komputer. Kedua personel ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan BMN, mulai dari pencatatan, pemeliharaan, hingga pelaporan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya tenaga yang kompeten dan terstruktur, pengelolaan BMN di PPS Bungus dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja merupakan prestasi kerja yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Untuk menilai efektivitas suatu program, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

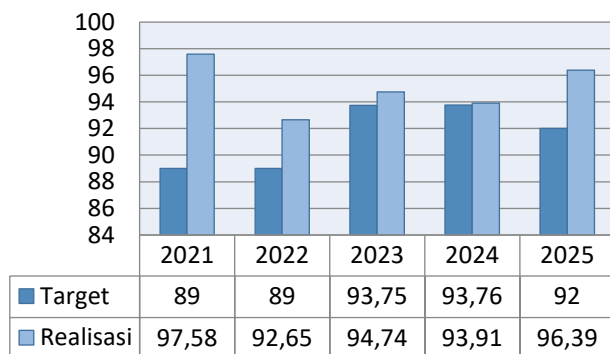
Salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja suatu Kementerian atau Lembaga. Pengukuran ini dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penilaian IKPA didasarkan pada 12 indikator utama yang mencerminkan berbagai aspek dalam pelaksanaan anggaran, yaitu: Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekonsiliasi LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Dengan adanya indikator-indikator ini, pelaksanaan anggaran dapat dipantau secara komprehensif, sehingga memungkinkan identifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.

Target dan Realisasi

Tabel 36 Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

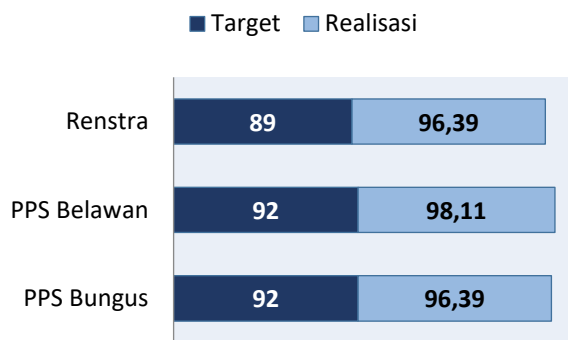
SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus		
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
99,34	97,58	92,65	93,91	96,39	92	96,39	104,77	89	96,39	



Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2025 tercatat sebesar 96,39. Nilai ini menunjukkan realisasi sebesar 104,77% dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 92, sehingga secara kinerja PPS Bungus dinilai berhasil melampaui target.

Gambar 34. Capaian PPS Bungus 2021-2025 Apabila dilihat secara tren tahunan periode 2021–2025, capaian IKPA PPS Bungus secara umum menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten berada di atas target. Namun demikian, realisasi tahun 2025 (96,39) mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2024 (93,91), meskipun persentase pencapaiannya relatif menurun karena target yang ditetapkan pada tahun 2025 lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun realisasi meningkat, tantangan dalam mempertahankan persentase capaian tetap ada, seiring meningkatnya standar kinerja yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 35, capaian IKPA PPS Bungus tahun 2025 telah mencapai 105,52% dari target Renstra sebesar 92. Hal ini menegaskan bahwa secara strategis, kinerja pelaksanaan anggaran PPS Bungus telah melampaui sasaran jangka menengah yang direncanakan, mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran selama periode perencanaan.



Gambar 35. Perbandingan Capaian

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan satuan kerja lain, khususnya Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, capaian IKPA PPS Bungus masih lebih rendah. PPS Belawan mencatat nilai IKPA sebesar 98,11, atau lebih tinggi sekitar 1,72 poin dibandingkan PPS Bungus. Perbedaan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat penyerapan anggaran, ketepatan perencanaan kegiatan, serta deviasi pada Halaman III DIPA, di mana PPS

Bungus masih menunjukkan ruang untuk perbaikan. Dengan demikian, meskipun PPS Bungus telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target, tetap diperlukan evaluasi dan optimalisasi pengelolaan anggaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Langkah ini penting agar capaian IKPA di tahun-tahun mendatang tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu menyamai atau melampaui kinerja satuan kerja terbaik lainnya.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran PPS Bungus adalah dengan menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari return SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, dengan komponen layanan dukungan manajemen internal untuk kegiatan layanan perkantoran.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 37. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	104,77%	2.106.565.000	2.105.679.934	2.207.031.701	101.351.767
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				4,81%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{0,13\%}{20} \times 50 \right)$				50,33%	

Upaya mendukung indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.106.565.000 dan sampai akhir tahun 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.105.679.934 atau 99,96% dengan efisiensi 4,81% dan nilai efisiensi 50,33%.

Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, didukung 6 (enam) orang pegawai yang terdiri dari 2 (dua) orang pengelola keuangan, 1 (satu) orang analis keuangan, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN Muda, dan 1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN Madya.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Perlu menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atau biasa disebut Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai Indikator Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diperoleh dari penggabungan 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

- Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Target dan Realisasi

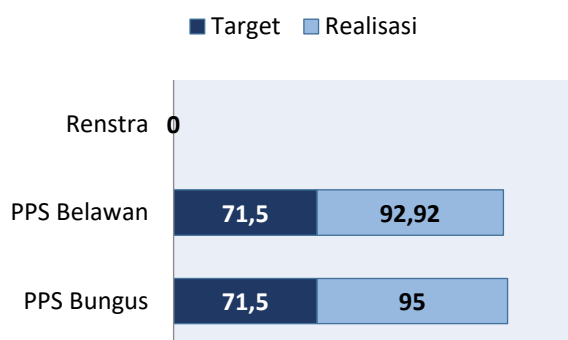
Tabel 38 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	90	95	71,5	95	132,87	-	-

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	032.03.531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	95,00	100,00	100,00	66,65	

Gambar 32. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2025 mencapai nilai 95 dengan persentase sebesar 132,87% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas dalam proses perencanaan anggaran yang telah dilakukan sepanjang tahun.



Gambar 37. Perbandingan Capaian

Jika dibandingkan dengan satuan kerja lainnya, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, baik target maupun capaian yang diperoleh PPS Bungus berada pada posisi atas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek perencanaan anggaran, PPS Bungus memiliki performa yang baik.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya sinergitas tim pengelola anggaran dan petugas pelaporan online menjadi faktor yang mendukung keberhasilan indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Kegiatan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI dilakukan secara rutin setiap awal bulan. Kegiatan sinkronisasi data capaian output juga dilaksanakan antara keuangan dan tim teknis.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah pelaksanaan pelaporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pelaporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek finansial terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terkelola dengan baik.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 39. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	132,87%	13.794.000	13.782.781	18.329.718	4.546.937
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				32,96%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{26,76\%}{20} \times 50\right)$				116,90%	

Upaya mendukung indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.794.000 dan sampai akhir tahun 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 13.782.781 atau 99,92% dengan efisiensi 32,96% dan nilai efisiensi 116,90%.

Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja nilai kinerja anggaran PPS Bungus, didukung oleh 1 (satu) orang pegawai APK APBN Muda yang melakukan inputing realisasi capaian output di Aplikasi SAKTI.

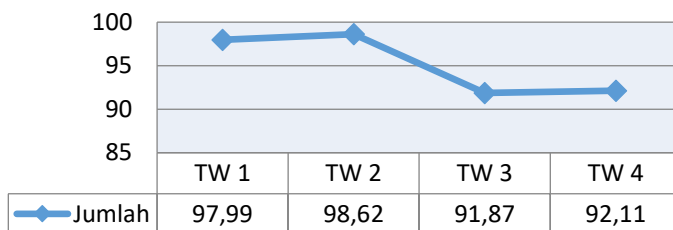
Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Target dan Realisasi

Tabel 40. Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target dan Realisasi 2025			Renstra PPS Bungus	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	88,61	91,37	92,11	88,50	92,11	104,08	-	-



Gambar 33. Capaian Nilai SKM PPS Bungus Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2025 mencapai 92,11 atau 104,08% dari target yang telah ditentukan. Grafik capaian SKM menunjukkan tren perkembangan dalam empat triwulan

sepanjang tahun 2025, mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang stabil dan meningkat. Selain itu, jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, yaitu PPS Belawan, capaian SKM PPS Bungus juga sedikit lebih tinggi dengan selisih 2,26%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan di kedua pelabuhan relatif setara, dengan PPS Bungus memiliki keunggulan tipis dalam penilaian kepuasan pengguna. Keberhasilan ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera antara lain melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa yang mengisi survey.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dan Key Performance Indicators (KPI). Pengukuran IKP memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan oleh pelabuhan. Data ini tidak hanya membantu dalam mengevaluasi kualitas layanan yang ada, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih dalam terkait dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 41. Analisa Efisiensi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera	104,08%	-	-	-	-
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				-	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{3,48\%}{20} \times 50 \right)$				-	

Indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera menunjukkan capaian kinerja yang baik, dengan realisasi sebesar 104,08% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berada di atas target yang direncanakan.

Indikator ini merupakan indikator non-budgeter, sehingga tidak didukung oleh alokasi dan realisasi anggaran secara langsung. Meskipun demikian, peningkatan kepuasan masyarakat dapat dicapai melalui perbaikan kualitas layanan, peningkatan profesionalisme petugas, serta optimalisasi prosedur pelayanan tanpa memerlukan dukungan anggaran khusus.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian Indikator Kinerja (IK) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera didukung oleh beberapa tim kerja yang berperan langsung dalam pemberian layanan kepada stakeholder dan pengguna jasa. Tim-tim kerja tersebut meliputi tim kerja dukungan manajerial, tim kerja operasional pelayanan usaha, tim kerja kesyahbandaran, tim kerja pelayanan usaha, dan tim kerja sarana dan prasarana. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memastikan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tim kerja dukungan manajerial berperan dalam mengoordinasikan strategi pelayanan, administrasi, dan pengelolaan sumber daya. Tim kerja operasional pelayanan usaha bertanggung jawab atas kelancaran operasional kegiatan usaha di pelabuhan. Tim kerja kesyahbandaran memastikan keselamatan dan kelancaran aktivitas kepelabuhanan sesuai regulasi. Tim kerja pelayanan usaha berfokus pada pelayanan langsung kepada pengguna jasa, sedangkan tim kerja sarana dan prasarana bertugas menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur serta fasilitas yang digunakan. Dukungan dari seluruh tim ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat sebagaimana tercermin dalam hasil survei. Sinergi antar tim kerja menjadi faktor utama dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan di Pelabuhan Perikanan Samudera.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 13.481.482.000,-** sesuai dengan DIPA PPS Bungus Tangkap TA. 2025 **Nomor: SP DIPA-032.03.2.531488/2025 tanggal 02 Desember 2024**, alokasi anggaran tersebut untuk 5 (lima) kegiatan yakni :

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
4. Program Dukungan Manajemen;
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan.

Realisasi anggaran sampai Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 12.576.497.674,-** atau sebesar **99.87%** dari pagu anggaran revisi sebesar **Rp. 12,592,979,000,-**.

Tabel 42. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2025

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2025 (Rp.)	Pagu Anggaran Revisi 2025 (Rp.)	Realisasi Anggaran Triwulan IV 2025	Persentase Realisasi Anggaran (%)
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	992.337.000,-	484,358,000,-	483,514,746,-	99.83%
1 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	987.524.000,-	479,545,000	478,841,246,-	99.85%
2 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	4.813.000,-	4,813,000	4,673,500,-	97.10%
Program Dukungan Manajemen	12.489.145.000,-	12,108,621,000	12,092,982,928,-	99.87%
3 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.489.145.000,-	12,108,621,000	12,092,982,928,-	99.87%

BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus pada Triwulan IV tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 111,49 persen.



Gambar 34. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus s/d Triwulan IV Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, semua Indikator Kinerja yang ditetapkan telah mencapai nilai/angka lebih atau diatas 100%.

Dalam Pelaksanaan pencapaian indikator kinerja PPS Bungus terdapat beberapa kendala/permasalahan, antara lain :

- Anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan masih terbatas sehingga peningkatan layanan dan kapasitas belum optimal.
- Terkendala dengan ada nya efisiensi anggaran menyebabkan beberapa gedung dan sarana prasarana mengalami kerusakan atau tidak termanfaatkan secara optimal.
- Layanan air masih mengandalkan sumber air bukit dan mengalami kendala saat musim kemarau.
- Lokasi pengecekan kelaikan kapal terlalu jauh dan jumlah petugas terbatas sehingga pelayanan kurang efektif.
- Masih adanya kapal yang melakukan aktivitas pembongkaran tanpa izin ke petugas pelabuhan khususnya pada saat malam hari sehingga mengakibatkan lost Data hasil tangkapan.
- Kesalahan saat penginputan Jenis ikan pada saat penginputan LPS sehingga terjadi perbedaan data pada aplikasi e-PIT dan aplikasi PIPP.

- g. Hasil tangkapan nelayan di PPS Bungus masih belum optimal karena banyak kapal nelayan yang tidak bisa melaut karena factor cuaca yang sangat ekstrim
- h. Masih kurangnya kesadaran pemilik kapal terhadap pentingnya kelengkapan dokumen perizinan.
- i. Kapal perikanan yang akan Docking ada yang belum memiliki dokumen yang lengkap
- j. Jumlah pegawai di PPS Bungus masih kurang dibandingkan beban kerja yang ada.
- k. Inovasi yang dapat diterapkan di PPS Bungus masih belum tersedia atau dikembangkan secara signifikan.

Adanya kendala/permasalahan dalam pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih besar untuk dapat mencapai kinerja yang lebih optimal kedepannya. Upaya-upaya dimaksud disampaikan sebagai rekomendasi upaya tidak lanjut dalam pencapaian tahun 2026.

4.2. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025, terdapat rekomendasi untuk peningkatan kinerja yang lebih optimal pada tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan pengusulan penambahan anggaran melalui perencanaan yang lebih komprehensif dan berbasis prioritas kebutuhan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia melalui efisiensi belanja dan skala prioritas pembangunan fasilitas pelabuhan.
- b. Melakukan inventarisasi dan pemetaan kondisi gedung serta sarana prasarana secara berkala, menyusun prioritas perbaikan, serta mengusulkan anggaran rehabilitasi secara bertahap agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal.
- c. Mengupayakan alternatif sumber air bersih seperti pembangunan sumur bor, penambahan tandon penampungan, atau kerja sama dengan pihak penyedia air bersih guna menjamin ketersediaan air terutama saat musim kemarau.
- d. Mengusulkan penambahan petugas pengecekan kelaikan kapal serta melakukan penataan ulang mekanisme pelayanan, termasuk kemungkinan pembukaan titik layanan yang lebih dekat dan efisien.
- e. Membuat himbauan dan aturan aktivitas pembongkaran ikan hanya dilakukan sampai pukul 21.00 Malam, serta membuat Jadwal piket bersama yang terdiri dari personil kesyahbandaran, operasional pelabuhan, PSDKP, dan petugas pendataan demi meminimalisir kegiatan pembongkaran tanpa izin yang mengakibatkan lost data.
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas melalui bimbingan teknis penginputan data, melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, serta memperkuat koordinasi pengelolaan data antara aplikasi e-PIT dan PIPP.

- g. Meningkatkan penyampaian informasi prakiraan cuaca kepada nelayan, mendorong penggunaan teknologi pendukung keselamatan pelayaran, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mitigasi risiko akibat cuaca ekstrem.
- h. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada pemilik kapal terkait pentingnya kelengkapan dokumen perizinan serta konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan.
- i. Memperketat pemeriksaan dokumen sebelum proses docking dilaksanakan serta memberikan pendampingan kepada pemilik kapal dalam melengkapi persyaratan administrasi.
- j. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai analisis beban kerja serta mengoptimalkan pembagian tugas dan fungsi yang ada untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.
- k. Mendorong pengembangan inovasi melalui pembentukan tim inovasi internal, studi banding ke pelabuhan lain, serta pemberian ruang bagi pegawai untuk mengusulkan dan mengimplementasikan ide-ide pembaruan layanan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Widodo**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus


Widodo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1. Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	2.012,12
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2. Volume produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	8.590,89
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab	3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	100
		4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	86
		5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	82
		6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	60
		7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	30,10
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	725
		9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10. Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	45,5
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	85
		12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	88

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	87
	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	76
	15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	81
	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	92
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71,5
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,50

Data Anggaran:


NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	987.524.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	4.813.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.489.145.000
Total Anggaran PPS Bungus Tahun 2025		13.481.482.000

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus


Widodo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara